



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Beliuk Sukadana Kabupaten Lampung Timur Kode Pos. 34194

Sukadana, 17 Maret 2025

Nomor : 700/UVS-WP/02-SK/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

Kepada
Yth. BUPATI LAMPUNG TIMUR
di -

SUKADANA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Nomor : 700/01/02-SK/2025 tanggal 03 Januari 2025 untuk melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari s/d 28 Maret 2025.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sedangkan sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

- 6.1.1.1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;
- 6.1.1.2. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja;
- 6.1.1.3. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai, tetapi masih ada yang belum bisa diukur realisasi dan capaian indikator kinerjanya yaitu :
 1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) dalam tabel 3:3, 3:4, 3:5, 3:6 dan 3:7;
 2. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam tabel 3:43, 3:44, 3:45 dan 3:47.
- 6.1.1.4. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 6.1.1.5. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- 6.1.1.6. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan akuntabilitas keuangan, tetapi masih ada yang belum disajikan terkait anggaran/sumber dana dan penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam capaian indikator kinerjanya yaitu :
 1. Indeks Infrastruktur Daerah dalam tabel 3:20;
 2. Persentase Penduduk Miskin (%) dalam tabel 3:34 dan 3:35;
 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dalam tabel 3:40 dan 3:41;
 4. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam tabel 3:47 dan 3:48;
 5. Opini BPK/WTP dalam tabel 3:66;
 6. Pertumbuhan Investasi Daerah (%) dalam tabel 3:79 dan 3:81.

6.1.2. Mekanisme Penyusunan

Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
- 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.
- 6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja sudah memadai (telah dibuatkan SOP).
- 6.1.2.4. Telah terdapat daftar penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6.1.2.5. Data/informasi kinerja yang disajikan telah diyakini keandalannya.
- 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- 6.1.2.7. Laporan Kinerja IP merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

6.1.3. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1. Adanya perbedaan redaksional kata pada 2 (dua) tujuan/sasaran dalam LKj yang *TIDAK SESUAI* dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja/PK :
 1. LKjIP "Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan" PK "Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (tabel 2.2)
 2. LKjIP "Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah" PK "Meningkatkan pertumbuhan investasi (tabel 2.2)"
- 6.1.3.2. Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) *TELAH SELARAS* dengan Rencana Strategis (RPJMD);
- 6.1.3.3. Adanya perbedaan nilai/angka target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja yaitu :
 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, IKU - Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dalam LKjIP sebesar 3,7% (tabel 3:36) sedangkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 3,6% (tabel 2.2);
Adanya perbedaan nilai/angka dalam target, realisasi, dan capaian kinerja per indikator dalam LKjIP yaitu :
 1. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah, IKU – Skor PPH (ton), pada tabel 3:2 sebesar 105 dan pada tabel 3:10 sebesar 106;
 2. Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah, IKU – Indek infrastruktur daerah, pada tabel 3:2 sebesar 0,56 – 0 – 0 dan pada tabel 3:16 sebesar 0,60 – 0,59 – 98;

3. Menurunnya persentase penduduk miskin, IKU – Persentase penduduk miskin (%), pada tabel 3:2 sebesar -8,42 dan pada tabel 3:30 sebesar 91;
 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, IKU – Laju pertumbuhan ekonomi (%), pada tabel 3:2 sebesar 3,6 – 3,6 – 100 dan pada tabel 3:36 sebesar 3,7 – 3,6 – 97;
 5. Meningkatnya kualitas layanan publik, IKU – Indeks kepuasan masyarakat, pada tabel 3:2 sebesar 77,35 dan pada tabel 3:55 sebesar 77;
 6. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, IKU – Pertumbuhan investasi daerah (%), pada tabel 3:2 sebesar - 88,35 dan pada tabel 3:75 sebesar -81,35
- 6.1.3.4. IKU Laporan Kinerja (LK) *TELAH SESUAI* dengan dokumen IKU yang ditetapkan;
- 6.1.3.5. Belum ada perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat (data dari BPS Tahun 2024 belum didapat) yaitu :
1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan, IKU – Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) tabel 3:4, 3:5, 3:6;
 2. Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah, IKU – Indeks infrastruktur daerah tabel 3:17, 3:19;
 3. Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, IKU – Persentase penurunan angka kriminalitas tabel 3:43, 3:44, 3:45;
 4. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, IKU – Pertumbuhan investasi daerah (%) tabel 3:76, 3:77, 3:78.
- 6.1.3.6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan secara umum telah memenuhi syarat SMART.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah :

1. Dalam format laporan kinerja agar menyajikan capaian kinerja IP dan akuntabilitas keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Dalam substansi laporan kinerja agar :
 - 2.1. Menyesuaikan tujuan/sasaran dalam LKjIP dan Perjanjian Kinerja;
 - 2.2. Koreksi nilai/angka dalam target, realisasi, dan capaian kinerja per indikator dalam LKjIP;
 - 2.3. Data kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu, beberapa tahun terakhir, data/standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat jika ada.

7. Tindak Lanjut atas Hasil Reviu

Permasalahan pengumpulan data kinerja sudah ditindaklanjuti pada saat reviu berlangsung.

8. Penutup

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Inspektur Pembantu Wilayah IV
Pengendali Mutu/Daltu,


ANDANG TRIWIBOWO, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19841011 200903 1 002

Tim Reviu :

1. HARRY KURNIAWAN, S.H., M.M
NIP. 19830907 200312 1 004
 2. EDI WAHYU N, S.H
NIP. 19731127 200604 1 006
 3. EKO SEPTIARTO, S.Si., M.M
NIP. 19800916 200212 1 004
 4. TEDI FANIZAR, S.H
NIP. 19901227 202203 1 004
 5. ARIS SUSANTO, S.I.P
NIP. 19830823 201001 1 003
- 

Mengetahui
INSPEKTUR,


Drs. TARMIZI

Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Beliuk Sukadana Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34194

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

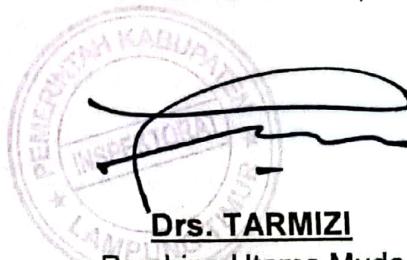
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lampung Timur, 17 Maret 2024

INSPEKTUR,



Drs. TARMIZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001

Lampiran :

Laporan Hasil Reviu atas LKjIP Kabupaten Lampung Timur TA. 2024

Nomor

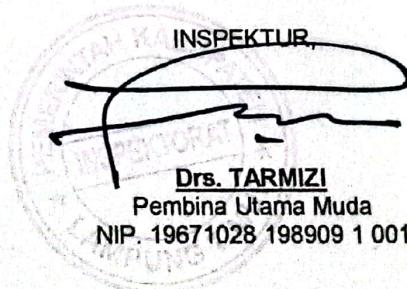
: 700/MTS.144/02-SK/2025

Tanggal

: 17 Maret 2025

FORMULIR CHECK LIST REVIU

NO		PERTANYAAN	CHECK LIST
I	FORMAT	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7 LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓
III	SUBSTANSI	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis/RPJMD	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran	✓
		5 IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10 IKU dan IK telah SMART	✓





Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu Laporan Kinerja ini juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program dalam usaha perbaikan kinerja secara terus menerus dan konsisten guna mewujudkan visi:

“ RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Sukadana, 17 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ELA SITI NURYAMAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari RPJMD 2021-2026. LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian dari 12 (dua belas) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian lebih dari 100 persen katagori sangat baik berjumlah 9 (Sembilan) Indikator.
2. Capaian 75 persen sampai dengan 100 persen katagori baik berjumlah 3 (tiga) Indikator.
3. Capaian kurang dari 55 persen katagori kurang berjumlah 1 (satu) Indikator.

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	3	3,98	125

2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton)	84,73	89,8	106
3	Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,60	0,53	88,33
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,6	73,05	106
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	14,4	13,19	91,60
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,6	4,62	128
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas.	2	9	450
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,99	114
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84	77,35	92
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	B	B	B
10	Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi Daerah	4	-16,27	-406
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah.	0,3	0,46	153
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,19	71,47	111

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu, kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di masa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	
A. Tofografi dan Luas Wiayah	3
B. Aspek Demografis	6
C. Jumlah Penduduk	6
E. Kondisi Pemerintahan	6
D. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	9
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Kabupaten Lampung Timur	9
1. Visi	9
2. Misi	11
3. Tujuan dan Sasaran	18
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja	31
III. AKUNTANBILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	38
IV. PENUTUP	96

Lampiran :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
2. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 01.a /08-UK/2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-Uk/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud azas akuntabilitas salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKjIP Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pedoman Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel.

2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2.

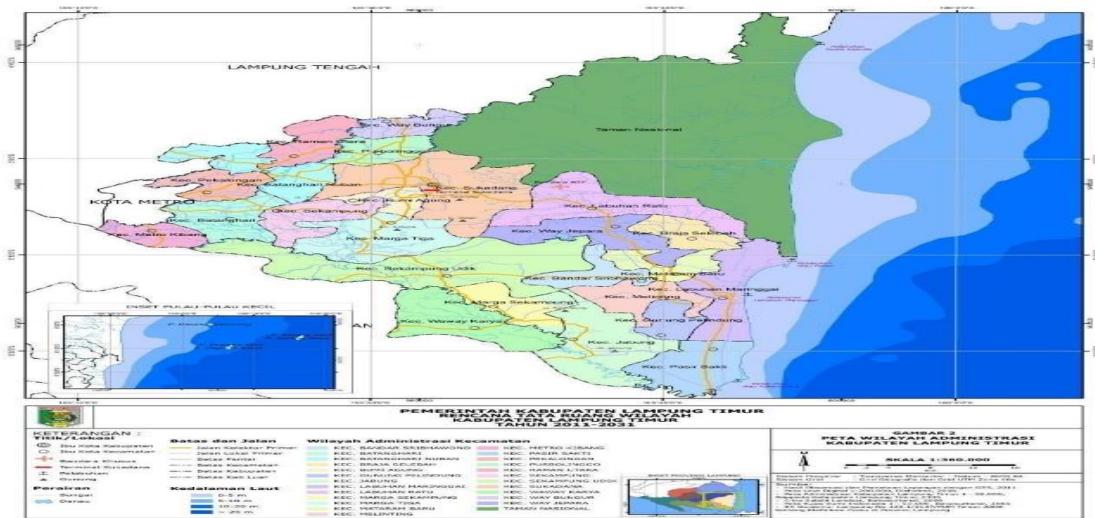
KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

a. Tofografi dan Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Selain wilayah daratan Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil yang antara lain:

- 1) Pulau Gosong Sekopong;
- 2) Pulau Segama Besar;
- 3) Pulau Segama Kecil;
- 4) Pulau Batang Besar;
- 5) Pulau Batang Kecil.

Gambar 1:1
Letak Lokasi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.



Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara $105^{\circ}15'$ BT– $106^{\circ}20'$ BT dan $4^{\circ}37'$ LS – $5^{\circ}37'$ LS, dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara $105^{\circ}15'$ BT– $106^{\circ}20'$ BT dan $4^{\circ}37'$ LS – $5^{\circ}37'$ LS, dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur, dan Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1:2
Peta wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur

Pembentukan administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembentukan Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pemerintah pusat di Sukadana. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.



- b. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan Pembantu Sekampung Udkik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
- c. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1:1
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Jumlah Desa	Luas area (HA)
1	Metro Kibang	Batangharjo	7	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	14.887,95
3	sekampung	Sumber Gede	17	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	25.072,94
5	Sekampung ^{udik}	Pugung Raharjo	15	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	19.393,83
8	Waway Karya	Labuhan Maringgai	11	19.498,73
9	Marga ^{Sekampung}	Peniangan	8	17.732,34
10	Labuhan maringgai	Labuhan Maringgai	11	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	7.956,11
12	Bandar Sribawono	Sribawono	7	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	22.926,92
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	7.317,47
20	Batang Hari ^{Nuhan}	Sukaraja Nuban	13	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	22.203,37
24	Way Bunggur	Tambah subur	8	37.638,19
	Jumlah		264	532.503,00

ASPEK DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Lampung Timur Pada tahun 2024 jumlah penduduk Lampung Timur berdasarkan hasil proyeksi penduduk mencapai 1.122,605 juta jiwa, yang terdiri dari 570.974 penduduk laki-laki dan 551.631 penduduk perempuan, dibandingkan tahun 2021 bahwa penduduk Lampung Timur mengalami pertumbuhan 1,81 persen dibandingkan tahun 2024.

Kepadatan penduduk pada tahun 2024 mencapai 209 jiwa/KM, kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Pekalongan dengan kepadatan 536 jiwa/KM.

JUMLAH PENDUDUK LAMPUNG TIMUR

Kecamatan		Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
(1)	(2)	(3)	
1. Metro Kibang	24.801	3,22	
2. Batanghari	60.511	1,52	
3. Sekampung	68.210	2,12	
4. Marga Tiga	49.962	0,54	
5. Sekampung Udik	79.072	2,91	
6. Jabung	55.559	2,07	
7. Pasir Sakti	42.498	-0,35	
8. Waway Karya	43.050	1,02	
9. Marga Sekampung	29.987	0,21	
10. Labuhan Maringgai	79.046	3,41	
11. Mataram Baru	30.957	0,60	
12. Bandar Sribhawono	53.782	3,57	
13. Melinting	28.989	-1,06	
14. Gunung Pelindung	23.901	-2,25	
15. Way Jepara	59.497	3,28	
16. Braja Slebah	26.154	0,26	
17. Labuhan Ratu	51.627	1,75	
18. Sukadana	77.995	3,86	
19. Bumi Agung	20.755	1,74	
20. Batanghari Nuban	48.399	1,80	
21. Pekalongan	53.738	2,36	
22. Raman Utara	41.447	1,18	
23. Purbolinggo	45.827	0,01	
24. Way Bungur	26.841	1,44	
Lampung Timur	1.122.605	1,81	

D. Kondisi Pemerintahan

Susunan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07). tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
24.	Badan Pendapatan Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	Kecamatan terdiri dari :
1.	Kecamatan Metro Kibang
2.	Kecamatan Batanghari

3.	Kecamatan Sekampung
4.	Kecamatan Marga Tiga
5.	Kecamatan Sekampung Udik
6.	Kecamatan Jabung
7.	Kecamatan Pasir Sakti
8.	Kecamatan Waway Karya
9.	Kecamatan Marga Sekampung
10.	Kecamatan Labuhan Maringgai
11.	Kecamatan Mataram Baru
12.	Kecamatan Bandar Sribhawono
13.	Kecamatan Melinting
14.	Kecamatan Gunung Pelindung
15.	Kecamatan Way Jepara
16.	Kecamatan Braja Selebah
17.	Kecamatan Labuhan Ratu
18	Kecamatan Sukadana
19.	Kecamatan Bumi Agung
20.	Kecamatan Batang Hari Nuban
21	Kecamatan Pekalongan
22.	Kecamatan Raman Utara
23.	Kecamatan Purbolinggo
24.	Kecamatan Way Bunggur

E. Aparat Pemerintah Apartur Sipil Negara (ASN)

Keadaan Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2024 berjumlah : 7.890 (*Tujuh ribu delapan ratus sembilan*).

**REKAPITULASI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN ESELON**



NO	ESELON	FORMASI TERISI	JML	PENGISIAN FORMASI			
				L	%	P	%
1	II-a	1	1	1	100		0
2	II-b	25	25	24	96,0	1	4,0
3	III-a	69	69	52	75,4	17	24,6
4	III-b	123	123	82	66,7	41	33,3
5	IV-a	180	180	118	65,6	62	34,4
6	IV-b	44	44	20	45	24	54,55
TOTAL		442	442	297	67,2	145	32,8

**REKAPITULASI DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN
(DATA PER 30 NOVEMBER 2024)**

NO	JENIS JABATAN	CPNS	PNS	PPPK	JML
1	Guru		3012	1595	4607
2	Kesehatan		1259	33	1292
3	Teknis				
	a. Struktural		442		442
	b. Fungsional Tertentu	1	502	53	556
	c. Fungsional Umum		993		993
TOTAL		1	6208	1681	7890

F. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk local.
2. Peningkatan kemampuan jalan kewenangan kabupaten.
3. Pemenuhan SPM dan pengentasan kemiskinan.
4. Penurunan stunting.
5. Pengendalian inflasi.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

7. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, realigius dan berbudaya.
8. Dukungan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres.
9. Pemenuhan anggaran Pilkada serentah 2024.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan kinerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam dokumen rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa rencana strategis merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

A. *Visi Kabupaten Lampung Timur*

1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang

akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses pemilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Interprestasi makna visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, difokuskan untuk mewujudkan kejayaan masyarakat Lampung Timur. Masyarakat adalah subyek utama dalam pembangunan daerah.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Kehidupan masyarakat yang religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

b. Kehidupan masyarakat yang berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (*added value*) yang tinggi, guna

- meningkatkan kualitas hidupnya.
- c. **Kehidupan masyarakat yang berkeadilan**
Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, peduli dan merakyat.
- d. **Kehidupan masyarakat yang sejahtera**
Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

2. **Misi**

Misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi "Rakyat Lampung Timur Berjaya" Tahun 2021-2026, disebut dengan **SIWAO MISEI**, terdiri dari :

- Misi-1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya
- Misi-2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
- Misi-3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- Misi-4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdayaa saing dengan berbasis pada ekonom lokal.

- Misi-5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- Misi-6 : Meningkatkan *good governance* (pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab).
- Misi-7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memperdayakan sumber daya kearifan lokal.
- Misi-8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.
- Misi-9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

1) Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui Program Petani Berjaya. Dalam rangka percepatan implementasi dan perluasan cakupan, program tersebut akan terintegrasi dengan Program Kartu Petani Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan seluruh *stake holder* secara bersama-sama.

Para pihak yang terlibat dalam program ini direncanakan meliputi petani, distributor benih/pupuk/obat, kelompok tani, penyuluh, kios saprotan, lembaga keuangan, buyer/pembeli, dan pemerintah daerah, yang memiliki peran sesuai kewenangannya. Terkait dengan peran perangkat daerah, meliputi fasilitasi kebijakan strategis dan teknis yang berkaitan dengan proses jalannya sistem, fasilitasi teknis yang berkaitan dengan registrasi akun operator masing-masing satuan kerja, dan fasilitasi teknis sosialisasi dan operasional untuk seluruh stake holder dibawahnya.

Implementasi Program Petani Berjaya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan dilakukan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui jaminan kepastian ketersediaan sarana produksi dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi.
- Peningkatan tata kelola budidaya, penangan panen dan pasca panen sektor pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan, melalui pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.

- c) Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d) Peningkatan pemasaran hasil usaha pertanian.

2) Misi 2

Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan dasar berbasis perdesaan yang dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Kemajuan infrastruktur fisik perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan hidup, dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Membangun/memelihara jaringan jalan dan jembatan, irigasi yang berkualitas dan merata untuk melayani pergerakan orang dan barang
- b) Membangun/memelihara infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, kesenian dan budaya yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
- c) Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dan sanitasi
- d) Membangun/memelihara infrastruktur pemerintahan dan publik yang mencerminkan identitas Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
- e) Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan.

3) Misi 3.

Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung Timur.

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan yang lebih berkualitas.
- a) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang merata dan berdaya saing.
- b) Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter dengan memadukan pendidikan agama dan umum.
- c) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah formal dan non formal.
- d) Peningkatan pelestarian seni dan budaya.
- e) Membangun sarana Balai Latihan Kerja Daerah.
- f) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.
- g) Peningkatan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial tenaga kerja.
- h) Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga.
- i) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
- j) Membangun/memelihara sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang lebih berkualitas.
- k) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- l) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standarkompetensi.
- m) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kualitas kehidupan beragama di masyarakat.
- n) Memelihara hubungan harmonis antar dan intern umat beragama, antar suku, dan antar ras yang harmonis.
- o) Pemberian subsidi listrik untuk masjid, pondok pesantren, dan tempat ibadahlainnya.

- p) Pemberian uang duka bagi masyarakat Lampung Timur yang keluarganya meninggal dunia.
- q) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum marginal dan rentan.
- r) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan social.
- s) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

4) **Misi 4**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor basis daerah, dengan meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya.

Peningkatan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal didukung dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
- b) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
- c) Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- d) Membangun/memelihara pasar daerah, pasar rakyat dan sarana serta prasarana perekonomian masyarakat lainnya secara berkualitas.
- e) Pengembangan sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, serta kawasan industri menengah dan besar.

5) **Misi 5**

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik daerah maupun nasional.

Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat, kemitraan masyarakat dan Polri/TNI
- b) Menciptakan wilayah yang aman dari tindak kejahatan dengan mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa sampai dengan kabupaten, Polri dan TNI.
- c) Peningkatan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.

6) Misi 6

Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Peningkatan *good governance* akan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penataan aparatur sipil negara. Peningkatan *good governance* dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penataan ASN yang profesional, jujur, peduli dan merakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b) Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Pengintegrasian sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan basis data yang terkini dan akurat.
- d) Implementasi program perencanaan daerah yang partisipatif
- e) Membangun data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- f) Peningkatan inovasi dan kerjasama pemerintah dan dunia usaha.

7) Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah seluas-luasnya bagi dunia usaha pada bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal. Peningkatan peluang usaha dan investasi dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- b) Peningkatan investasi sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral.
- c) Peningkatan investasi sektor kepariwisataan
- d) Membuka dan meningkatkan kerjasama BUMD dan BUMDes.

8) Misi 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana. Peningkatan penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan program penanganan pandemi penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.
- b) Menyelenggarakan program mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- c) Menyelenggarakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

9) Misi 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan

melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup.
- b) Penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c) Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup.
- d) Peningkatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- e) Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

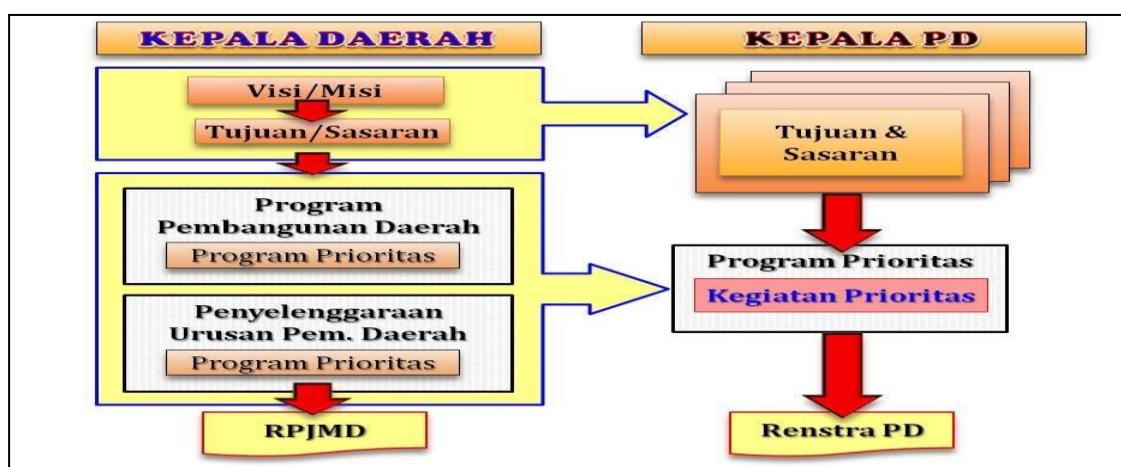
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dan *money follow priority*, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan PD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.1

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



**Penjabaran Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari :**

a. Misi 1

Meningkatkan Program Petani Berjaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%).
		Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.	Skor Pola Pangan Harapan.

b. Misi 2

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Multi Sektor Berbasis Pedesaan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1		Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis perdesaan	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Penurunan kecelakaan lalu lintas (%).
			Persentase luas sawah beririgasi (%)
			Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%).
		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa.
			Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%).

	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan).
--	--	---

c. Misi 3

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Dasar	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)
			Rata-rata lama sekolah (tahun)
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)
			Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)
	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
			Indeks Pembangunan Pemuda.
	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada even olahraga PORPROV.
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)
		Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%).
	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%).
		Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG).
			Persentase Desa Layak Anak (%).

d. Misi 4 :

Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDES, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah.	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%).
		Meningkatkan pertumbuhan perdagangan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%). Inflasi Pangan sektor bergerak dan (%)
			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)
		Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%).

e. Misi 5

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik.	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk
		Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi

f. Misi 6

Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP
			Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%) Indeks Inovasi Daerah Zona Pelayanan Ombudsman Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
			Persentase capaian target propemperda (%) (TPB) Persentase kepemilikan KTP-el (%)
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini) Kapabilitas APIP
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%).
		Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa). Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%).

g. Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan local.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)

h. Misi 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan mitigasi Bencana.	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba.	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%).
			Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)
		Meningkatkan upaya mitigasi Bencana.	Indeks Risiko Bencana Daerah Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

i. Misi 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indicator
	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2021-2026**

VISI :
“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

MISI 1: “MENINGKATKAN PROGRAM PETANI BERJAYA”

No .	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Rumus perhitungan	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Persentase	$= \frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ n - PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ (n-1)}{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ (n-1)} \times 100\%$	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Dinas Perikanan dan Peternakan. 3. BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 2. Dinas Perikanan dan Peternakan.
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan	Skor PPH (ton)	Skor	Skor PPH= % kontribusi energi AKG X bobot	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

	daerah.				Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	<p>Indeks Infrastruktur Daerah = $[30\%(I_J) + 25\%(I_I) + 20\%(I_{PR}) + 25\%(I_{PM})]$</p> $I_{PM} = [50\%(I_{AIR}) + 50\%(I_{BAB})]$ <p>Perhitungan :</p> $I_J = \frac{\text{Panjang Jalan kondisi mantap} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}{\text{Panjang Jalan mantap maksimum} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}$ $I_I = \frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik} - \text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik maksimum} - \text{panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}$ $I_{PR} = \frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW maksimum} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}$ $I_{AIR} = \frac{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani maksimum} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}$ $I_{BAB} = \frac{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB maksimum} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}$ <p>Ket :</p> <p>I_J : Indeks Kemantapan Jalan</p> <p>I_I : Indeks Kemantapan Jaringan Irigasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> Range Kemantapan : 0,67 – 1,00 : MANTAP 0,34 – 0,66 : SEDANG 0,00 – 0,33 : TIDAK MANTAP </div>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

				I_{PR} : Indeks Penataan Ruang I_{Pm} : Indeks Kemantapan Permukiman I_{Air} : Indeks RT berfasilitas air minum bersih I_{BAB} : Indeks RT berfasilitas tempat BAB		
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia.	Indeks	$IMP = \frac{1}{3} (X1 + X2 \times X3)$ Keterangan : X1 = Indeks Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks Standar Hidup Layak	BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5	Menurunnya persentase penduduk miskin.	Persentase Penduduk Miskin (%).	Persentase	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - yi}{z} \right]^\alpha$ Keterangan: $\alpha = 0$. z = garis kemiskinan. yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $yi < 1$. Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.	BPS Kabupaten Lampung Timur.	1. Dinas Sosial. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

				$n = \text{jumlah penduduk}$		
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	Persentase	$R(t-1, t) = \frac{[PDB_t - PDB_{t-1}]}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>R = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen</p> <p>PDB_t = pendapatan nasional pada tahun t</p> <p>PDB_{t-1} = pendapatan nasional pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)</p>	BPS Kabupaten Lampung Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Sekretariat Daerah.
7	Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban	Percentase Penurunan Angka Kriminalitas.	Persentase	$\frac{kejadian_{(n)} - kejadian_{(n-1)}}{jumlah kejadian_{(n-1)}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>jumlah kejadian_(n-1) = jumlah kejadian satu tahun sebelumnya.</p>	BPS Kabupaten Lampung Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Sekretariat Daerah

	Masyarakat.			$jumlah kejadian_{(n)} = jumlah kejadian tahun yang sedang berjalan.$																		
8	Meningkatnya kualitas layanan publik.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	$IPP = Nilai Aspek Pelayanan Publik \times bobot$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Sekretariat Daerah.																
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Sekretariat Daerah.																
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.	Opini BPK/WTP (opini).	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.																
		Nilai SAKIP.	Nilai	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Komponen yang dinilai : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen 1 Keberadaan</th> <th>Sub Komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub Komponen 13 Pemanfaatan</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 13 Pemanfaatan	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%		2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 13 Pemanfaatan	Bobot																	
1	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%																		
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																	

					3	Pelaporan Kinerja	6	9	15	30		Birokrasi.				
					4	Evaluasi Internal	3	4,5	7,5	15						
					5	Capaian Kinerja	5	7,5	12,5	25						
					6	Nilai hasil Tingkat Akutabilitas	20	30	50	100						
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (%).	Pertumbuhan investasi daerah (%).	Persentase		$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun } n - \text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun } n-1}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun } n} \times 100\%$								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran.	Indeks Ketahanan Daerah.	Indeks		<p>Berdasarkan laman inarisk, diperoleh metode perhitungan IKD sebagai berikut</p> <pre> graph LR A[71 Indikator] --> B[MASING-MASING INDIKATOR ADA 4 PERTANYAAN] B --> C[PERTANYAAN 1] B --> D[PERTANYAAN 2] B --> E[PERTANYAAN 3] B --> F[PERTANYAAN 4] C --> G[YA = 1] C --> H[TIDAK = 0] D --> G D --> H E --> G E --> H F --> G F --> H G --> I[Level 1] H --> I G --> J[Level 2] H --> J G --> K[Level 3] H --> K G --> L[Level 4] H --> L G --> M[Level 5] H --> M </pre>								Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	1. Dinas Sosial 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
12	Meningkatnya tata kelola dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		IKA Indeks Kualitas Air								Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan		

	<p>kualitas lingkungan hidup.</p> <p>(IKLH).</p>		<p>Adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu</p> <p>IKU Indeks Kualitas Udara Adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (leu - 0,1) \right)$ <p>IKL Indeks Kualitas Lahan Adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) x 100 \right) x \frac{50}{54,3}$ <p>IKLH Kabupaten IKLH = $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$</p>	<p>n Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</p>	<p>Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</p>
--	--	--	---	---	---

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

No.	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
			1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	0,32	1	2	3	4	4
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton).	84,70	84,71	84,72	84,73	84,74	84,75
3	Meningkatnya kemantapan infrastruktur daerah.	Indeks Infrastruktur Daerah.	0,5	0,52	0,56	0,60	0,68	0,68
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia.	69,39	69,4	69,5	69,6	69,8	69,9
5	Menurunnya persentase penduduk miskin.	Persentase Penduduk Miskin.	14,62	14,62	14,55	14,4	14,2	14
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah .	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	1,0	3,5	3,5	3,6	3,8	4
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat.	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas.	1	1	2	2	2	4
8	Meningkatnya kualitas layanan publik .	Indeks Pelayanan Publik.	2,00	2,05	2,10	3,50	3,80	4,10

		Indeks Kepuasan Masyarakat.	81	82	83	84	85	86
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B	B
10	Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah.	Pertumbuhan investasi daerah.	0,1	4	4	20	20	25
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	0,24	0,24	0,26	0,3	0,41	0,44
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	62,97	63,38	63,79	64,19	64,59	64,99

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 telah ditetapkan pada awal tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No .	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	3
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton)	84,73
3	Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,60
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,6
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	14,4
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,6
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	2
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84

9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP
		Nilai SAKIP	B
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Pertumbuhan investasi daerah	20
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	0,3
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,19

PROGRAM ANGGARAN

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan.	268.752.368.638
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.	24.252.800.000
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.	68.260.400
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	120.056.865.650
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	3.888.142.699
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	2.906.807.358
7.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	630.000.000
8.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan.	169.042.000
9.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHSTI).	931.898.500
10.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah 83).	703.500.000
11.	Program Pengelolaan Persampahan.	1.596.687.000
12.	Program Penyelenggaraan Jalan.	267.558.947.811
13.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	5.438.950.000
14.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	8.677.479.939
15.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	1.410.787.250
16.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1.317.165.000
17.	Program Penanggulangan Bencana.	1.188.495.159

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
18.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	3.977.853.807
19.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.	10.168.827.805
20.	Program Pemberdayaan Sosial.	1.580.000.000
21.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	15.000.000
22.	Program Rehabilitasi Sosial.	987.180.000
23.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	246.000.000
24.	Program Penanganan Bencana.	325.000.000
25.	Program Pengembangan Perumahan.	383.587.600
26.	Program Kawasan Permukiman.	1.025.000.000
27.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).	5.118.323.988
28.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7.721.557.708
29.	Program Pendaftaran Penduduk.	992.342.064
30.	Program Pencatatan Sipil.	154.999.896
31.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	272.583.959
32.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	1.440.959.678
33.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	5.544.294.296
34.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	225.000.000
35.	Program Penempatan Tenaga Kerja.	75.000.000
36.	Program Hubungan Industrial.	105.225.000
37.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.	100.000.000
38.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.	35.000.000
39.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi.	35.000.000
40.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.	134.387.680
41.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
	Dan Usaha Mikro (UMKM).	300.944.320
42.	Program Pengembangan UMKM.	540.302.000
43.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	355.000.000
44.	Program Promosi Penanaman Modal.	490.457.702
45.	Program Pelayanan Penanaman Modal.	496.090.000
46.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	813.332.000
47.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	630.000.000
48.	Program Penanganan Kerawanan Pangan.	10.000.000
49.	Program Pengawasan Keamanan Pangan.	10.000.000
50.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	565.433.000
51.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	4.807.408.000
52.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.	100.000.000
53.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.	587.063.690
54.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	1.230.431.000
55.	Program Pemasaran Pariwisata.	281.750.000
56.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.	862.500.000
57.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	29.843.313.418
58.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	3.533.815.000
59.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	210.000.000
60.	Program Perizinan Usaha Pertanian.	25.000.000
61.	Program Penyuluhan Pertanian.	493.000.000
62.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	100.000.000
63.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.	40.000.000
64.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	2.217.871.300
65.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.	351.175.200
66.	Program Pengembangan Ekspor.	

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
		1.671.297.564
67.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.	235.556.900
68.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.	716.130.436
69.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri.	81.000.000
70.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.	45.000.000
71.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	440.523.262.756
72.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	2.384.532.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang mengambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

A. Metode Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\% \text{ Capaian kinerja} = \underline{\text{realisasi}} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\% \text{ Capaian kinerja} = \underline{\text{rencana}} - (\underline{\text{realisasi-rencana}}) \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

Atau

$$\frac{\% \text{ Capaian kinerja} = \underline{\text{rencana}} - \underline{\text{realisasi}} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3:1
Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\frac{\% \text{ Capaian sasaran} = \text{Jumlah Indikator Untuk setiap kategori} \times \text{Nilai Mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100 \%$$

B. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Sasaran strategis berjumlah 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Target Kinerja yang digunakan adalah target yang ditetapkan di Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024. Lampung Timur Pencapaian IKU Bupati tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

C. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tabel 3:2
CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3	3,98	125
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton)	84,73	89,8	106
3	Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,60	0,53	88,33
4	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pembangunan	69,6	73,05	103

	Sumberdaya Manusia	Manusia			
5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	14,4	13,19	91,60
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,6	4,62	128
7	Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas.	2	9	450
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,99	114
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84	77,35	92
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	B	B	B
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah	20	-16,27	-81,35
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah.	0,26	0,46	153
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,19	71,47	111

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan

Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (%).

Pada tahun 2023 capaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 0.07 % capaian ini menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Realisasi capaian pada tahun 2022 1.45 % atau terjadi penurunan 95.17 % dari capaian pertumbuhan PDRB tahun 2023. Capaian ini turun 96.5 % bila dibandingkan dengan target capaian yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten lampung Timur tahun 2021 – 2026 yaitu 2 %.

- a. Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024

Tabel 3:3
Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	3	3,98	125

Capaian pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 adalah 125 persen dari target yang ditetapkan, artinya realisasi melebihi target sebesar 25 persen capaian **sangat baik**.

- b. Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 S/D 2024.

Tabel 3:4
Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	1,45	0,07	3,75	134	3,5	125

Dari 2022 ke 2023, sektor ini mengalami pertumbuhan +1,86% (naik). Dari 2023 ke 2024, sektor ini mengalami penurunan -3,32% (turun).

Ini berarti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan pada 2023, tetapi kemudian mengalami kontraksi pada 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, kebijakan pemerintah, harga komoditas, atau faktor ekonomi lainnya.

- c. Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Tabel 3:5

Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	3	3,98	125

- d. Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3:6

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	3,5	125
Provinsi Lampung	1,96	0,55
Sumatera Selatan		

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Koordinasi dengan berbagai stakeholder lingkup pertanian diantaranya penyuluh pertanian, kelompok tani dan Gapoktan.
 - 2) Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan dan motivasi kepada petani untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komuditas-komuditas yang dibudidayakan. Pemerintah Kabupaten lampung timur memberikan bantuan yang diperuntukan kepada kelompok tani maupun gapoktan melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan bersumber APBD maupun Dana Alokasi Khusus.
 - 3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian.
- f. Permasalahan dalam capaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pegawai penyuluh pertanian dilingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten lampung Timur.
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian.

- 3) Berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah.
 - 4) Pengaruh Dampak Perubahan Iklim seperti banjir yang menyebabkan kegagalan panen, adanya serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT) juga dapat mengakibatkan fuso atau gagal panen.
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).
- 1) Adanya permasalahan berkurangnya SDM khususnya penyuluhan pertanian, pada saat ini sedang diupayakan usulan penambahan pegawai penyuluhan pertanian diantaranya memberikan rekomendasi pegawai dinas yang mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional penyuluhan pertanian serta melakukan evaluasi penataan wilayah binaan kepada penyuluhan yang ada pada saat ini.
 - 2) Pada permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana pertanian Pemerintah kabupaten Lampung Timur telah menganggarkan bantuan sarana dan prasarana pertanian diperuntukan ke kelompok tani yang membutuhkan. Sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya benih yang meliputi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan alat mesin pertanian yang meliputi alat penggolahan tanah sampai peralatan untuk penanganan pasca panen. Guna menunjang kelancaran transportasi pengakutan hasil panen telah dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi.
 - 3) Mengatasi permasalahan berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pembangunan sumber-sumber air berupa sumur bor pada wilayah pertanian yang kekurangan ketersediaan air. Upaya mengatasi kesuburan tanah diantaranya adalah memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk dan penyubur tanah dan tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
 - 4) melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa Alat Penggolahan Pupuk Organik (APPO) serta penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik dan juga pestisida berbahan organik.
 - 5) Mengatasi permasalahan berkurangnya ketersediaan air dan kesuburan tanah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pembangunan embung pada wilayah pertanian yang kekurangan ketersediaan air, tetapi pada tahun 2023 anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan embung tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran. Upaya mengatasi kesuburan tanah diantaranya adalah memberikan

- penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk dan penyubur tanah dan tidak berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui anggaran di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) serta penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik dan juga pestisida berbahan organik.
- 6) Permasalahan pengaruh Dampak Perubahan Iklim seperti banjir, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengimbau kepada petani yang mengusahakan komuditas padi sawah untuk mengikuti program pemerintah yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan mendaftarkan lahan aeral persawahannya di awal musim tanam. Asuransi Usaha Tani Padi adalah salah satu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kerugian petani akibat gagal panen. Pada permasalahan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) upaya yang dilakukan diantaranya dengan memberikan bantuan untuk mengendalikan serangan OPT diantaranya alat pengendalian OPT seperti stik kompor tikus dan pembangunan Rumah Burung Hantu (RUBUHA) di beberapa lokasi serta pelatihan dan bimbingan tentang budidaya tumbuhan pengendali hama secara hayati serta pelatihan pembuatan pestisida alami.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	125	68,14	183

- g. Penjelasan program anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%), format sebagai berikut :

Tabel 3:8

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Progam Penyediaan Dan Pengembangan	29.884.313.418	19.468.324.037

	Sarana Pertanian		
2.	Progam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.533.815.000	3.251.223.616
3.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	210.000.000	153.756.839
4.	Program penyuluhan pertanian	493.000.000	377.027.971

2. Sasaran Strategis
Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.
Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan.

Dari segi kuantitas, situasi konsumsi pangan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil data sekunder susenas tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Jumlah energi yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 1.964 kkal/kap/hari, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2.065 Kkal/kap/hari dan masih di bawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan WKNPG XI tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kap/hari (AKE). Mengacu pada standar anjuran tersebut dan data tabel terlihat tingkat konsumsi energy rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur masih dibawah standar yang dianjurkan.

Tabel 3:9
Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk
Berdasarkan Data Susenas 2024

Kelompok/Jenis Pangan	Konsumsi Energi*)			AKE Standar	TKE (%)
	Standar*)	Kalori	%		
Kab. Lampung Timur	2.100	1.964	100	100	93,5
1. Padi-padian	1.050	1.081	55,1	50	51,5
2. Umbi-Umbian	126	49	2,5	6	2,3
3. Pangan Hewani	252	202	10,3	12	9,6
4. Minyak dan Lemak	210	272	13,8	10	12,9
5. Buah/Biji Berminyak	63	38	1,9	3	1,8
6. Kacang-kacangan	105	74	3,8	5	3,5
7. Gula	105	61	3,1	5	2,9
8. Sayur dan Buah	126	139	7,1	6	6,6
9. Lain-Lain	63	48	2,4	3	2,3

Sumber : Susenas Tahun 2024

Keterangan = *) Kkal/Kap/Hari

a. Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 3:10
Indikator Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Skor Pola Pangan Harapan	84,73	89,8	106

Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah capaian 106 persen melebihi dari target sebesar 6 persen yang ditetapkan yaitu 84,73 persen berarti capaian **sangan baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 S/D tahun 2024

Tabel 3: 11
Perbandingan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan Kinerja tahun 2022 S/D tahun 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan Kinerja	91,5	91,3	89,8	108	107	106

- 1) Tahun 2022 Realisasi 91,5 Capaian 107% Capaian 107% berarti realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) melebihi target sebesar 7%.
- 2) Tahun 2023 Realisasi 91,3 Capaian 107% Meskipun realisasi sedikit turun dari 91,5 menjadi 91,3, capaian tetap 107%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi.
- 3) Tahun 2024 Realisasi 89,8 Capaian 106% Realisasi turun lebih jauh menjadi 89,8, dan capaian juga menurun menjadi 106%, yang berarti target mungkin tetap tinggi, tetapi realisasi tidak mencapai angka tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD.

Tabel 3:12

Perbandingan Realisasi capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Skor Pola Pangan Harapan	84,73	89,8	106

Capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan pola pangan harapan sampai dengan tahun 2024 adalah 105 persen, yang berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional.

Tabel 3:13

Perbandingan Realisasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional

Skor Pola Pangan Harapan.	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	91,5	89,8
Provinsi Lampung	94,1	91,12
Nasional	94,1	93,5

Bahwa tahun 2024 skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur masih dibawah Provinsi Lampung sebesar 91,12 dan target RPJMD sebesar 95,2, untuk tingkat Provinsi Lampung dari 13 Kabupaten dan 2 kota, Kabupaten Lampung Timur masih berada pada level 4 Kabupaten Skor Pola Pangan Harapan diatas Provinsi Kabupaten Lampung Tengah 93,71, Pesawaran 93,24, Lampung Selatan 92,8, Metro 92,21, Way Kanan 91,66, Bandar Lampung 90,19, Mesuji 90,08, sedangkan Kabupaten skor PPH dibawah 90 yaitu Kabupaten Pringsewu 89,78, Tulang Bawang 89,59, Tanggamus 87,52, Pesisir Barat 87,51, Lampung Barat 87, Tulang Bawang Barat 86,72, Lampung Utara 85,24, sementara skor PPH tingkat Nasional tahun 2024 mencapai 93,5 lebih rendah dari RPJMN yaitu 95,2.

Grafik 3:1
Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019-2024



Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian indicator Skor Pola Pangan Harapan, sebagai berikut :

- 1) Perubahan Iklim Perubahan cuaca yang tidak menentu seperti kekeringan dan hujan berlebih dapat mempengaruhi hasil pertanian terutama padi dan jagung. Hasil panen jagung di Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan 28% dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata hasil panen yang seharusnya berkisar antara 1,5-2 ton per hektar kini hanya mencapai 85-90 kuintal per hektar. Beberapa petani menyebutkan bahwa kondisi cuaca yang buruk dan keterlambatan dalam penanaman berkontribusi terhadap hasil yang tidak maksimal.
- 2) Penyakit tanaman dan serangan hama yang meningkat.
- 3) Keterbatasan Akses Modal
Banyak petani mengalami kesulitan mendapatkan akses pinjaman atau modal untuk membeli benih berkualitas dan pupuk. Dengan hasil panen yang menurun banyak petani mengalami kesulitan untuk menutupi biaya modal yang mereka keluarkan untuk budidaya. Sebagian besar modal yang digunakan adalah pinjaman, sehingga penurunan pendapatan sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar kembali.

- 4) Infrastruktur yang kurang memadai Jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas penyimpanan dapat menghambat distribusi produksi pertanian.
- 5) Harga Pangan yang fluktuatif ketidakstabilan harga yang di pasar dapat mempengaruhi pendapatan petani.
- 6) Penggunaan teknologi yang terbatas
Rendahnya adopsi teknologi pertanian modern dapat mengurangi efisiensi dan hasil produksi.
- 7) Persaingan Pasar Meningkatnya persaingan dengan pasar produk impor dapat menekan harga dan permintaan produk lokal.
- 8) Kurangnya pendidikan dan pelatihan rendahnya pengetahuan tentang praktik pertanian yang lebih baik dapat menghambat inovasi dan produktivitas.
- 9) Kurangnya pendidikan dan pelatihan rendahnya pengetahuan tentang praktik pertanian yang lebih baik dapat menghambat inovasi dan produktivitas.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja indikator skor pola pangan harapan anatara lain :

- 1) Dilakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang gerakan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 2) Peningkatan produksi.
- 3) Pengembangan infrastruktur.
- 4) Kerjasama dengan instansi.
- 5) Akses pasar yang baik.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:14
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Skor Pola Pangan Harapan	89,8	59,69	150%

- 1) Efisiensi lebih tinggi dari 100% menunjukkan bahwa dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah, capaian kinerja yang diperoleh melampaui yang diharapkan.
 - 2) Hal ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang sangat efisien, karena anggaran yang lebih besar dari yang ditargetkan.
- f. Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan.

Tabel 3:15
Realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan.

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realiasi
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	164.949.500	98.458.600

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan Aman) tingkat Kabupaten dengan mengikutsertakan seluruh PKK Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dan juga mengikuti lomba B2SA tingkat Provinsi.

3. Sasaran Strategis
Meningkatan Kemantapan Infrastruktur Daerah.
Indikator Infrasruktur Daerah.

3. Sasaran strategis
 - a. Capaian indikator Indeks Infrastruktur Daerah

Tabel 3:16
Indikator Indeks Infrastruktur Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Infrastruktur Daerah	0,60	0,53	88,53

Capaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2024 dengan target 0,60 Realisasi 0,70 dengan Capaian 117 kategori **sangat baik**.

Bahwa Indikator Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Lampung Timur mencerminkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, yang diukur adalah :

- | | | | | |
|---|--|---|-------|---|
| 1 | Indeks Kemantapan Jalan (Ij) | : | 54,70 | % |
| 2 | Indeks Kemantapan Jaringan Irigasi (Ii) | : | 47,32 | % |
| 3 | Indeks Penataan Ruang (Ipr) | : | 11,79 | % |
| 4 | Indeks Kemantapan Permukiman (Ipm) | : | 88,39 | % |
| | Indeks RT Berfasilitas Air Minum Bersih (Iair) | : | 88,18 | % |
| | Indeks RT Berfasilitas Tempat BAB (Ibab) | : | 88,59 | % |

- b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3:17

Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun sebelumnya

Indikator	Realisasi			Capaian		
	202 2	2023	2024	202 2	202 3	2024
Indeks Infrastruktur Daerah	-	-	0,53	-	-	88,33

Pada tahun 2024, Indeks Infrastruktur Daerah digunakan sebagai salah satu indeks dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, menggantikan beberapa indikator sebelumnya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indeks Infrastruktur Daerah tersebut untuk memastikan keselarasan dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Oleh sebab itu, Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Implementasi Indeks Infrastruktur Daerah ini merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa komponen utama dalam perhitungan Indeks Infrastruktur Daerah yaitu untuk mengukur ketersediaan infrastruktur, menilai kualitas infrastruktur yang ada, mengukur aksesibilitas dan keterjangkauan, serta menilai upaya Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menjamin keberlanjutan infrastruktur untuk jangka panjang.

- c. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target IKU

Tabel 3:18

Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Indeks Infrastruktur Daerah dengan target IKU

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah.	0,60	0,53	88,33

Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 0,53. Angka tersebut mengindikasikan bahwa skala kemantapan infrastruktur daerah Kabupaten Lampung Timur berada pada kondisi Sedang. Indeks dengan kriteria Sedang dapat menunjukkan bahwa infrastruktur memenuhi kebutuhan dasar tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aspek kualitas, aksesibilitas atau kapasitas. Selain itu, angka tersebut menunjukkan infrastruktur memerlukan peningkatan atau pemeliharaan untuk mencapai kondisi optimal.

Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah yang dicapai berada sedikit di atas target yang ditetapkan yaitu 0,60, secara persentase dapat dicapai sebesar 87,82% dari target. Walaupun capaian sudah lebih dari 80%, namun terdapat beberapa parameter yang perlu ditingkatkan, seperti indeks kemantapan jalan, indeks penataan ruang dan indeks kemantapan jaringan irigasi yang masih berada di bawah 60%.

- d. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional.

Tabel 3:19

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Lampung Timur kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Dongola

Indeks Infrastruktur Daerah	Capaian
	Tahun 2023
Kabupaten Lampung Timur	117
Kabupaten Gunung Kidul	102,56
Kabupaten Dongola	68,48

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Infrastruktur Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan hambatan sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat

- Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap masih di angka 54,70%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat 45,3% ruas-ruas jalan yang perlu dilakukan perbaikan, sedangkan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah sangat terbatas untuk penanganan secara keseluruhan ruas.
- Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Lanpung Timur memiliki indeks 47,32% mengindikasikan bahwa jaringan kinerja jelek dan perlu segera penanganan.

2) Faktor Pendukung

- a. Adanya Dana Transfer berupa DAK, DAU yang ditentukan penggunaanya, dan DBH Sawit untuk menunjang pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dalam program-program infrastruktur yang dilaksanakan.
- b. Terdapat pekerjaan-pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan oleh BP2JN.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Tabel 3:20
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Indeks Infrastruktur Daerah	117%	76,28%	153

Tingkat efisiensi 153 persen menunjukkan bahwa capaian kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

- g. Realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah

Tabel 3:21
Realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Indeks Infrastruktur Daerah.

No.	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.438.950.000	4.285.428.160
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.677.479.939	5.422.029.203
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.410.787.250	1.153.270.361
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	267.558.947.811	205.532.519.634
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.317.165.000	552.536.537

4. Sasaran Strategis

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 dua daerah di Lampung, yakni Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro bergerak lamban hanya tumbuh 0,57 poin dibanding tahun 2023.

Berdasarkan penghitungan metode baru IPM yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Lampung Timur 2024 tercatat sebesar 71,84, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 71,21 atau hanya tumbuh 0,57 poin.

Angka tersebut adalah 'lampa kuning' bagi Kabupaten Lampung Timur, sebab laju tumbuh IPM kabupaten ini pada 2023 sempat meningkat 0,63 poin dibanding tahun 2022.

Tabel 3:22

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2022-2024

Komponen IPM	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Angka Harapan Hidup	73,75	73,95	74,19
Angka Harapan Lama Sekolah	12,96	12,97	12,98
Rata-rata lama sekolah	8,04	8,14	8,20
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	10,403	10,812	11,262
Jumlah	70,82	72,44	73,05

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Berikut adalah penjelasannya:

Tahun 2022: 70,82

Pada tahun ini, IPM Lampung Timur masih berada di kategori sedang (IPM antara 60–70).

Peningkatan dari tahun sebelumnya kemungkinan didorong oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tahun 2023: 72,44

Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022.

IPM sudah masuk ke kategori tinggi (di atas 70), menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Faktor utama yang mungkin berkontribusi adalah peningkatan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pendapatan per kapita.

Tahun 2024: 73,05.

Kenaikan masih terjadi, meskipun lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia terus membaik, tetapi peningkatan bisa mulai melambat karena tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan yang cepat.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Lampung Timur semakin baik. Namun, untuk mempertahankan tren positif ini, perlu adanya keberlanjutan dalam program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

a. Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 3:23
Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia.	69,6	73,05	105

Capaian kinerja sebesar 105% menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Timur tercapai melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berhasil dengan **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s/d 2024

Tabel 3:24
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	70,58	71,21	73,05	101	97	105

Tahun 2022: 101,70% → Realisasi melampaui target sebesar 1,70%.

Tahun 2023: 102,31% → Realisasi melampaui target sebesar 2,31%.

Tahun 2024: 103,22% → Realisasi melampaui target sebesar 3,22%.

Bawa :

Setiap tahun, capaian IPM selalu melebihi target yang ditetapkan.

Peningkatan capaian menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. bahwa kebijakan pembangunan manusia berjalan efektif dan memberikan hasil positif, dengan demikian capaian sangat baik.

Dari tahun 2022 ke tahun 2023, realisasi sedikit meningkat dari 70,58% ke 71,21% namun capaian mengalami penurunan, ditahun 2024 terjadi kenaikan kecil dari realisasi 71,21 % ke 71,84 %, capain ini meningkat dari target yang ditetapkan.

- c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 dengan target RPJMD.

Tabel 3:25

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Pembangunan Manusia	69.6	73.05	105

Capaian Indeks Pembangunan Manusia mencapai 105 persen dari target RPJMD, capain kinerja di atas 100 persen berarti realisasi IPM melampau target ditetapkan, dengan realisasi 73.05 persen target 69.6 persen telah terlampaui target sebesar 5 persen lebih tinggi dari target hal ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- d. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional

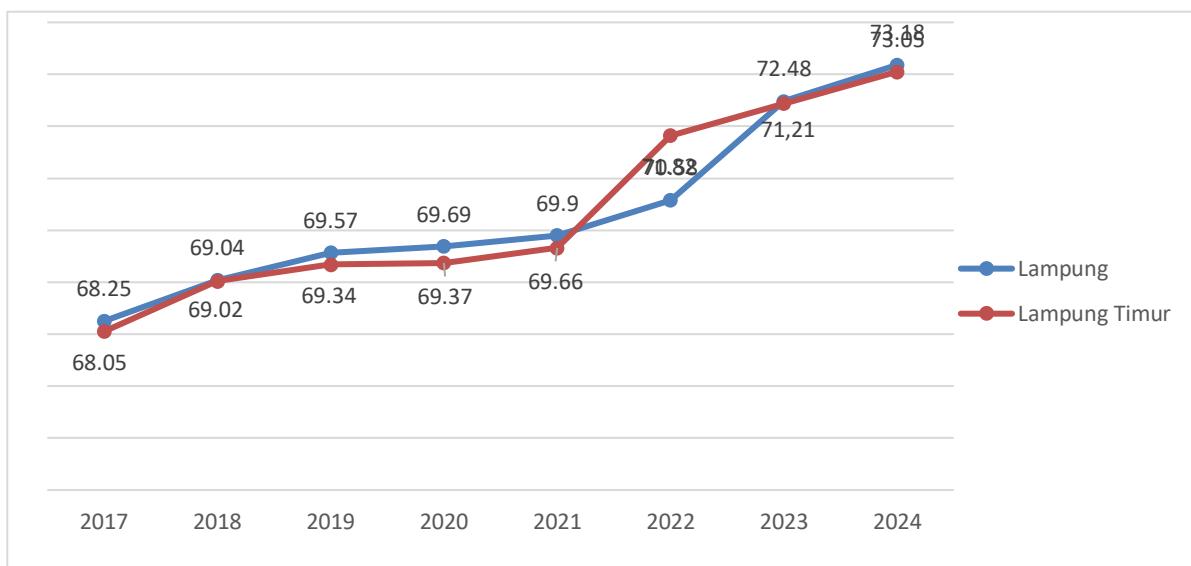
Tabel 3:26

Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia.	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	72,44	73,05
Provinsi Lampung	72,48	73,18
Nasional	74,39,	75,02

Grafik 3:2

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2024

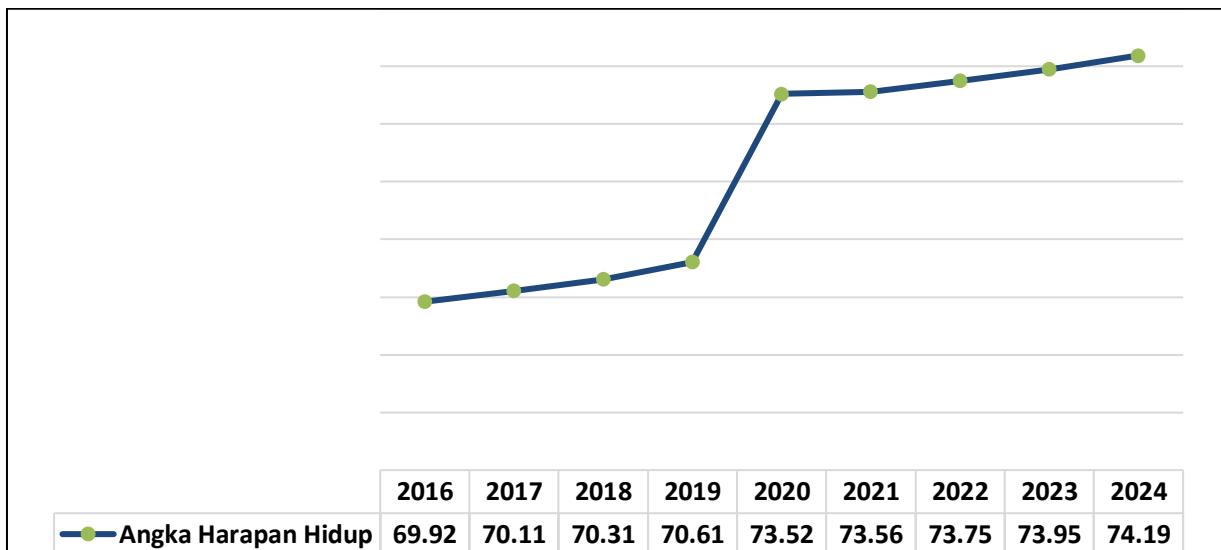


A. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Lampung Timur selama periode 2019-2024 mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019 masih sebesar 73,52. Namun pada tahun 2024, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 74,19. Hal ini berarti bahwa bayi yang baru lahir rata-rata dapat bertahan hidup hingga usia 73 sampai 74.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Kenaikan angka harapan hidup terjadi setiap tahun pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 angka harapan hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 0,20 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

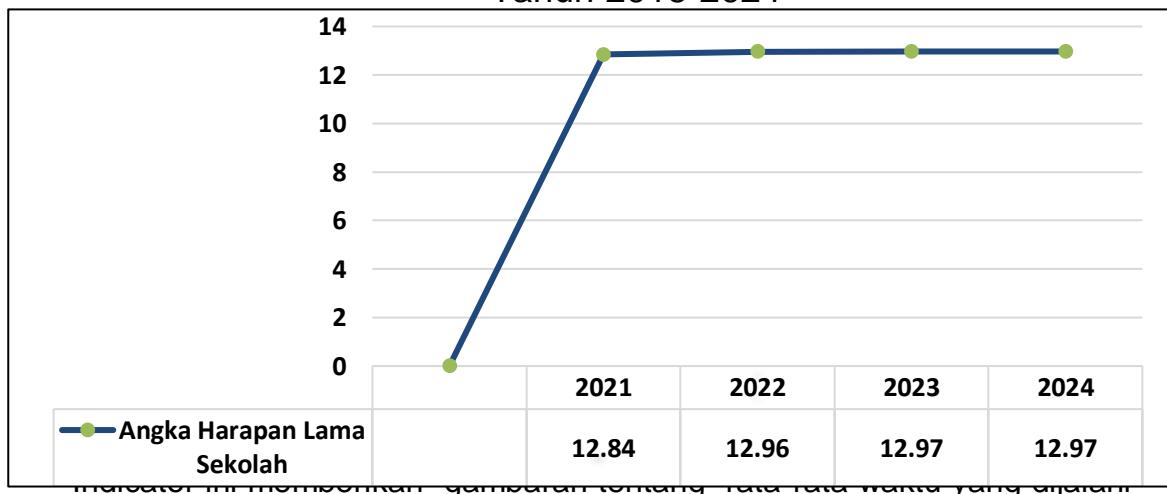
Grafik 3:3
Angka harapan hidup tahun 2016-2023



1. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi capaian kinerja AHH sebagai berikut :
 - a. Komitmen dalam mempertahankan hasil akreditasi baik di RSUD Sukadana maupun Puskesmas.
 - b. Akreditasi untuk RSUD kategori paripurna
 - c. Akreditasi untuk Puskesmas :
 - 1) Paripurna : 14
 - 2) Utama : 19
 - 3) Madya : 1
 - 4) Dasar : 0
 - d. Adanya beberapa regulasi bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian indicator kinerja.
 - e. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya berkualitas.
 - f. Adanya kolaborasi dengan lintas perangkat daerah.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Grafik 3:4
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2016-2024



penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan kecil tetapi cenderung stagnan pada tahun terakhir. Berikut adalah analisisnya:

1. Tahun 2021 ke 2022 → Naik dari 12,84 ke 12,96 tahun (+0,12 tahun)
Terjadi peningkatan yang cukup baik, yang bisa mencerminkan adanya upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah, peningkatan tenaga pendidik, atau program pendidikan tambahan.
2. Tahun 2022 ke 2023 → Naik dari 12,96 ke 12,97 tahun (+0,01 tahun)
Peningkatan sangat kecil, yang mungkin menunjukkan bahwa faktor-faktor yang sebelumnya mendorong kenaikan AHLS mulai melambat atau mengalami kendala.
3. Tahun 2023 ke 2024 → Tetap di angka 12,97 tahun (stagnan)
Tidak ada peningkatan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, keterbatasan ekonomi masyarakat, atau kurangnya program baru yang mendorong peningkatan lama sekolah.
4. Tren positif tetapi melambat: Ada peningkatan di awal, tetapi mulai stagnan pada tahun 2023 dan 2024.

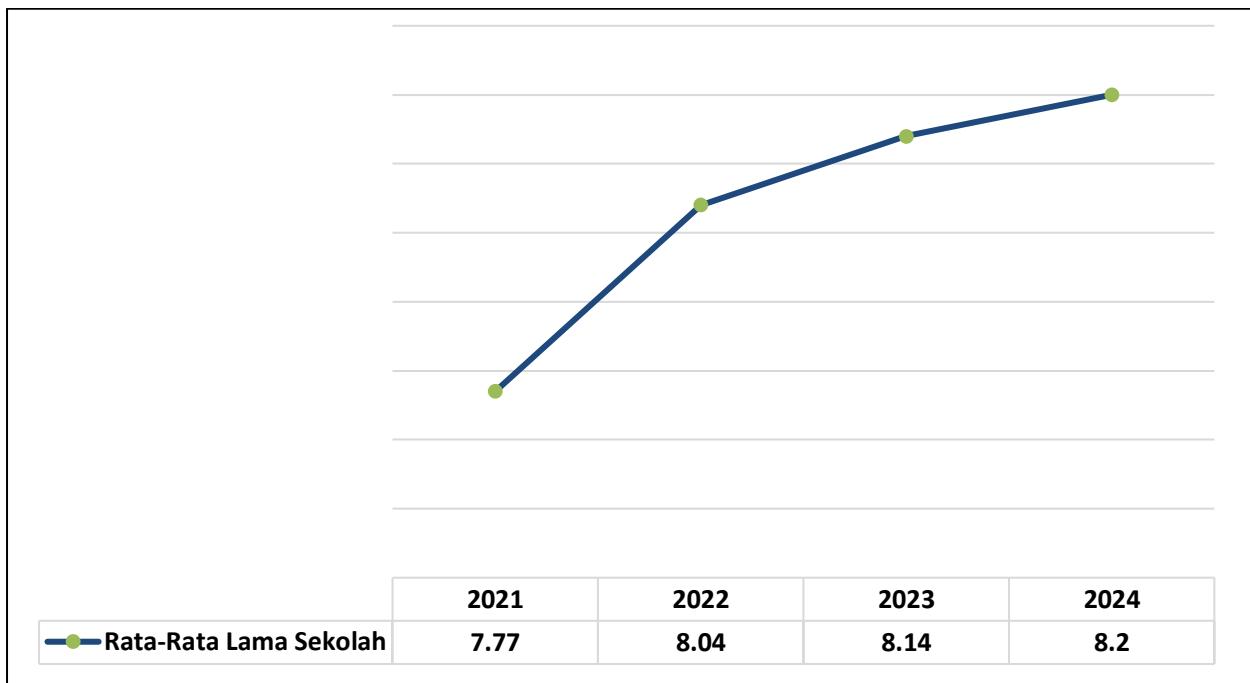
Tren positif tetapi melambat: Ada peningkatan di awal, tetapi mulai stagnan pada tahun 2023 dan 2024.

Faktor penghambat bisa beragam, seperti akses pendidikan tinggi yang masih terbatas, dropout, atau faktor ekonomi yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan lebih lama.

Diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk kembali mendorong kenaikan AHLS, seperti beasiswa, program wajib belajar yang lebih efektif, atau peningkatan kualitas pendidikan di jenjang menengah dan tinggi.

Jika tren stagnan ini terus berlanjut, perlu dievaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Lampung Timur agar AHLS dapat terus meningkat.

Grafik 3:5
Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2016-2023



Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data RLS di Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun:

1. Peningkatan Bertahap: RLS mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun dalam angka yang relatif kecil. Ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan formal.
2. Mendekati 9 Tahun (SMP Selesai): Standar pendidikan dasar di Indonesia adalah 9 tahun (SD + SMP). Dengan angka 8,20 pada tahun 2024, berarti rata-rata penduduk Lampung Timur hampir menyelesaikan jenjang SMP.

Meskipun sudah meningkat, angka RLS di Lampung Timur masih di bawah 9 tahun, yang menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk meningkatkan angka ini, perlu terus didorong program pendidikan yang memastikan anak-anak tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk suatu wilayah dalam menempuh pendidikan formal.

Peningkatan Rata-rata lama sekolah (RLS) Lampung Timur dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan kecil, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesempatan pendidikan, walaupun belum signifikan.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk menilai

pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

E. Pengeluaran perkapita

Pengeluaran per kapita adalah salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks IPM, pengeluaran per kapita digunakan sebagai indikator standar hidup yang dihitung berdasarkan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peningkatan Bertahap: Data menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran per kapita setiap tahunnya, yang bisa mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Peningkatan pengeluaran per kapita di Lampung Timur dalam empat tahun terakhir mencerminkan adanya perbaikan dalam standar hidup masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa peningkatan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan, perlu dilihat dalam konteks inflasi dan distribusi pendapatan. Jika diiringi dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan, maka IPM Lampung Timur akan semakin membaik.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 3:27
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Bidang Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia	71,84	97,65%	73,57
Bidang Kesehatan Indeks Pembangunan Manusia	AHH 74,19	78,22	94,85

- f. Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator.

Tabel 3:28

Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator
Indeks Pembangunan Manusia

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Pendidikan.	268.752.368.638	262.424.658.889
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.056.865.650	94.840.468.180,83
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.888.142.699	2.888.808.268
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	663.831.000	354.402.300
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.906.807.358	1.660.347.998
Jumlah	127.515.646.707	99.744.026.746,83

5. Sasaran Strategis

Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

Indikator Persentase Penduduk Miskin

Indikator Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 ditetapkan target 14,4, realisasi 13,19 Persen, jumlah penduduk miskin, yaitu sebanyak 142,69 ribu orang.

- a. Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin.

Tabel 3:29
Indikator Persentase Penduduk Miskin.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penduduk Miskin	14,4	13,19	91,60

Capaian penduduk miskin capaianya lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dengan demikian capain **baik**.

- b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:30
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin	13,98	13,8	13,19	95	94	91,60

Melihat tabel sebagaimana tersebut diatas bahwa angka kemiskinan selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah 0,18% dan dari tahun 2023 ke 2024 adalah 0,61 %, yang berarti ada peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan di tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2024 dengan target RPJMD

Tabel 3:31
Perbandingan Realisasi Indikator Indikator Kinerja tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian Kinerja
Persentase Penduduk Miskin	14,4	13,19	91,60

Indikator persentase dalam RPJMD menetakan target 14,4 %, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 91%, yang berarti realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, dengan demikian program pengentasan kemiskinan berhasil lebih dari yang direncanakan.

d. Perbandingan Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.

Tabel 3:32
Perbandingan Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	13,8	13,19
Provinsi Lampung	11,11	10,69
Nasional	9,36	8,57

Indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 ditetapkan target 14,4. Realisasi Indikator Persentase Penduduk

Miskin tahun 2024 turun menjadi 13,19 % capaian kinerja sebesar 91,60 hal ini menunjukkan tingkat kemajuan yang positif dari target jangka menengah RPJMD 2021- 2026.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengentasan kemiskinan antara lain :

- a. Pemberian bantuan tunai.
- b. Bantuan paket pemakaman untuk lanjut usia terlantar, anak dan anak stunting.
- c. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%.
- d. Monitoring ketersediaan pangan dan stabilisasi harga barang pokok dan bersubsidi di pasar, gudang bulog, gudang distributor, sentra pertanian dan penggilingan padi.
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga.
- f. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- g. Bantuan Pendidikan pada program Pengelolaan Pendidikan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar.
- h. Bantuan Pendidikan pada Program Pengelolaan Pendidikan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama.
- i. Pemberian Tunjangan Guru Honorer.
- j. Penyediaan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat.
- k. Fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi (pelatihan dan bantuan modal usaha)
- l. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
- m. Pelayanan pencari kerja (*online dan offline*).
- n. Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.



- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:33

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Penduduk Miskin	91,60	99,72	91,86

Tingkat efisiensi 91,86% berarti bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan dengan cukup baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nilai mendekati 100% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien.

- f. Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Tabel 3:34
Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.000.000	245.314.514

6. Sasaran Strategis

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indikator Laju pertumbuhan Ekonomi

- a. Realisasi capaian kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3:35
Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Target	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,6	4,62	128

Bawa target adalah 3,6 persen realisasi 4,62 persen dan capaian 128 persen dengan demikian Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%) capaian melebihi target **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3 :36
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	2,02	3,51	4,62	57	100	128

Tahun 2022: Capaian rendah (57%), ekonomi belum pulih optimal.

Tahun 2023: Capaian sesuai target (100,29%), pertumbuhan ekonomi mulai stabil.

Tahun 2024: Capaian tinggi (128,33%), ekonomi tumbuh pesat melebihi harapan.

Dari tren ini, terlihat bahwa ekonomi mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang semakin baik setiap tahunnya.

Tabel 3:37
c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024
dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	3,7	4,62	128

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3:38

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Indikator Ekonomi	Laju Pertumbuhan	Realisasi Capaian	
		Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur		3,51	4,62
Provinsi Lampung		4,00	4,33
Nasional		4,55	5.03

Kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran 2,02 % sampai dengan 3,79 %, yaitu Laju pertumbuhan sangat baik.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 32,87 %, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,13 % dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,18 %.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tumbuh sebesar 4,33 persen, perekonomian Lampung di tahun 2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Industri, dan Perdagangan, masing-masing dengan kontribusi sebesar 27,29 persen, 18,01 persen, dan 13,98 persen. Ketiga sektor ini menyumbang 59,28 persen terhadap total PDRB Lampung.

Pada tahun 2024, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 32,62 persen, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 26,65 persen dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 9,60 persen. Sedangkan kontribusi pembentukan PDRB Lampung Timur yang terkecil adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya menyumbang sebesar 0,05 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi antara lain :

a. Permasalahan

- 1) Urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil.
- 2) Daya beli masyarakat berkurang.
- 3) Kekalahan daya saing dalam paroduk yang dihasilkan.
- 4) Impor menghambat pertumbuhan ekonomi.

- 5) Belum optimalnya manajemen pemasaran sehingga kalah bersaing dengan industri olahan besar.
- b. Solusi
- 1) Mendorong kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan daerah.
 - 2) Meningkatkan usaha kecil menengah yang berpotensi (UKM).
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap hasil mutu produk unggulan dan mengurangi impor.
 - 4) Mengurangi impor dan meningkatkan expor.
 - 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelatihan ketrampilan.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:39
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	128	96,52	132

- d. Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Tabel 3:40
Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.671.297.564	96,52

7. Sasaran strategis

Meningkatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban Masyarakat.

Indikator Penurunan Angka Kriminalitas

- a. Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase Penurunan Angka Kriminalitas.

Tabel 3:41
Indikator Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

Indikator	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Penurunan angka kriminalitas	2	9	450

Berdasarkan data dari Polres Lampung Timur, sepanjang tahun 2024 terjadi penurunan angka tindak pidana sekitar 9% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, tercatat 1.190 kasus tindak pidana, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 1.083 kasus capaian kinerja **sangat baik**.

- b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Penurunan angka kriminalitas Kinerja tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3 : 42
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Penurunan angka kriminalitas Kinerja tahun 2022 s.d 2024

	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Penurunan angka kriminalitas		23,78	9	3	37	450

- c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Persentase Penurunan angka kriminalitas dengan target IKU.

Tabel 3:43
Perbandingan Realisasi capaian Indikator Persentase Penurunan angka kriminalitas dengan target IKU

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Penurunan angka kriminalitas	2	9	450

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3:44
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Prsentase Penurunan angka kriminalitas	Realisasi	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	37	9
Provinsi Lampung	18,8	5,03
Nasional	0,45	4,23

a. Permasalahan :

- 1) Minimnya pengetahuan terkait pelanggaran hukum
- 2) Minimnya pembinaan dari lingkungan keluarga dan sekolah
- 3) Masukkan budaya asing tanpa diseleksi
- 4) Tingkat kemiskinan

b. Solusi

- 1) Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu
- 2) Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga Pendidikan mendidik anak.
- 3) Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya.
- 4) Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat.
- 5) Meningkatkan lapangan kerja

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3:45
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Prsentase Penurunan angka kriminalitas	450	95,56	470

f. Anggaran yang digunakan untuk Prsentase Penurunan angka kriminalitas adalah :

Tabel 3:46
Anggaran yang digunakan untuk mendukung Persentase Penurunan angka kriminalitas

Program	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.10.168.827.805	Rp. 9,716.930.909

8. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas layanan publik.

Indikator Indeks Pelayanan Publik. b. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3:47
Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,99	114

Dengan capaian 114 persen, ini menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan kinerja **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:48
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,58	2,10	3,99	174	100	114

Pada Tahun 2022: Realisasi 3,58, capaian 174% pelayanan publik pada tahun ini sangat baik dibandingkan ekspektasi, pada Tahun 2023: Realisasi 2,10, capaian 100% Ini berarti realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan Namun, terjadi penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022, Tahun 2024: Realisasi 3,99, capaian 114%. Ada peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, baik dalam realisasi maupun capaian. Capaian 114% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui, meskipun tidak sebesar capaian di tahun 2022.

Dari tahun 2022 ke tahun 2023:

Terjadi penurunan realisasi dari 3,58 ke 2,10, atau sekitar 41,34%.

Capaian turun drastis dari 174% ke 100%, menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Dari 2023 ke 2024:

Realisasi meningkat dari 2,10 ke 3,99 (kenaikan 90%).

Capaian naik dari 100% ke 114%, menunjukkan perbaikan dalam pelayanan.

- c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2024 dengan target RPJMD

Tabel 3:49

Perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,99	114

- d. Indeks Pelayanan Publik Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Kementerian

Tabel 3:50

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur dengan Provinsi dan Kementerian

Indeks Pelayanan Publik	Realisasi	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	210	3,99
Provinsi Lampung	4,05	4,14
Nasional/Kementerian Dalam Negeri	4,56	



Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 meraih penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan nilai 90,28 dengan kategori A (Kualitas Tertinggi) dan masuk Zona Hijau.

Adapun yang mendapat penilaian 5 (lima) unit pelayanan yaitu :

1. Puskesmas Pekalongan dengan nilai 96,19
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 95,08.
3. Puskesmas Sukadana dengan nilai 94,72
4. Dinas Sosial dengan nilai 92,03
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 90,76.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 72,88.

a. Permasalahan

- 1) Belum semua perangkat daerah menetapkan standar pelayanan publik dengan baik.
- 2) Belum seluruhnya tersusun standar operasional prosedur kegiatan rutin terkait dengan pelayanan.
- 3) Masih terdapat petugas yang kurang ramah terhadap pelanggan.
- 4) Adanya pengaduan dari masyarakat yang tidak ditanggapi.

b. Solusi

- 1) Penetapan standar pelayanan yang merupakan suatu komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan kualitas tertentu yang telah ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, sarana dan prasarana serta waktu dan biaya pelayanan.

- 2) Pengembangan Standar Operasional Prosedur
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya *Standard Operating Procedures*. Dengan adanya *Standard Operating Procedures*, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
- 3) Pengembangan Survey Kepuasan Masyarakat
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- 4) Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:51
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Indeks Pelayanan Publik	3,99	87,72%	4,55

f. Anggaran yang digunakan untuk kualitas Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3:52
Anggaran yang digunakan untuk kualitas Indeks Pelayanan Publik

Program	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Rp.80.216.245	Rp.70.366.000

g. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel : 3:53
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	77	92

Meskipun belum mencapai sesuai target yaitu 84 dan realisasi 77 dengan capaian 92 masih menunjukkan capaian kinerja baik.

h. Capaian kinerja Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:54
Capaian Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 dan 2024

Indikator	Realisasi		Capaian	
	2022	2024	2022	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03	77,35	101	92

Realisasi tidak mencapai target hanya 92 dari target yang ditetapkan, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, dimana IKM turun dari 84,03 menjadi 77,35.

i. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target IKU.

Tabel 3: 55
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2024 dengan target IKU

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	77,35	92

- j. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung dengan Provinsi dan Nasional

Tabel 3:56

Tabel perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung dengan Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi	
	Tahun 2022	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	84,03	77,35
Propinsi Lampung	79,07	80,04
Nasional/Kemen PAN&RB	90,14	

Penjelasan keberhasilan terhadap pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Keberhasilan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. IKM sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik lainnya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan keberhasilan pencapaian IKM:

- Kualitas Pelayanan** **Pencapaian**
Pencapaian IKM yang tinggi sering kali berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini meliputi ketepatan waktu, profesionalisme, kemudahan akses, serta responsivitas terhadap keluhan masyarakat.
- Keterlibatan Stakeholder**
Keberhasilan dalam mencapai indikator IKM juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, pegawai layanan publik, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut dalam meningkatkan layanan sangat penting.
- Pemanfaatan Teknologi**
Penggunaan teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti sistem online, aplikasi pelayanan, atau e-Government, dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena mempersingkat waktu dan meningkatkan efisiensi.
- Transparansi dan Akuntabilitas**
Masyarakat lebih puas dengan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Jika informasi terkait proses pelayanan tersedia dengan jelas dan mudah diakses, serta ada mekanisme pengaduan yang efisien, maka tingkat kepuasan masyarakat cenderung lebih tinggi.

5. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan dalam pencapaian IKM juga bergantung pada kualitas SDM yang memberikan pelayanan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Terhadap Umpan Balik Masyarakat

Masyarakat merasa lebih puas jika pendapat dan keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti. Proses evaluasi yang berkala terhadap pelayanan publik serta penerapan perbaikan berdasarkan umpan balik ini akan membantu meningkatkan IKM.

7. Fasilitas dan Sarana Prasarana yang Memadai

Penyediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman, sarana yang bersih dan terawat, serta infrastruktur yang mendukung, dapat memengaruhi penilaian positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pencapaian tinggi pada Indeks Kepuasan Masyarakat menggambarkan bahwa pemerintah atau lembaga pelayanan publik telah berhasil dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

a. Penjelasan permasalahan terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik tentunya memiliki prosedur pelayanan yang berbeda-beda disetiap unit pelayanan publiknya. Dalam proses pelayanan tersebut masyarakat juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda pula ketika menggunakan layanan tersebut. Faktor yang paling banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat adalah sarana dan prasarana pelayanan yang perlu ditingkatkan. Faktor kedua adalah perilaku pelaksana yang kurang ramah dalam memperlakukan masyarakat yang datang untuk pelayanan dan yang Ketiga adalah perlu ditingatkannya kebersihan dan kerapian lingkungan kantor pelayanan publik.

b. Penjelasan langkah-langkah yang dilakukan pencapaian terhadap permasalahan terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Penyadaran mendalam terhadap petugas pelayanan publik, bahwa pelayanan adalah merupakan tanggungjawab negara
- 2) Mendorong setiap pegawai untuk terbuka atas berbagai hal yang dipandang tidak sesuai dengan pedoman pelayanan kepada pihak pimpinan untuk memperoleh tindak lanjut sehingga proses pelayanan tetap berjalan

- 3) Mendorong seluruh jajaran pimpinan dan setiap pegawai untuk bertanggungjawab terhadap setiap kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan
 - 4) Memastikan setiap pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya sehingga pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:57
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran %	Tingkat efisiensi %
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,35	91,80	84,3%

Tingkat efisiensi adalah 84,3%, artinya untuk setiap rupiah yang dibelanjakan, capaian kinerja yang dibelanjakan, capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang diserap, menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya.

- f. Tabel anggaran kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3:58
Tabel anggaran kegiatan untuk pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 121.920.000,-	Rp. 111.908.680,-

9. Sasaran Strategis

Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

a. Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan. b. Indikator Nilai SAKIP

a. Indikator Opini BPK/WTP

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk

akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 yaitu "**Meningkatkan good governance** (Pemerintah yang baik dan bertanggung jawab)".

- Realisasi Capaian Kinerja Indikator Opini BPK/WTP (Opini).

Tabel 3:59
Indikator Opini BPK/WTP (opini)

Indikator	Target	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP

- Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:60
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

- c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Tabel 3:61

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP

- d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.

Tabel 3:62

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Opini BPK/WTP (opini).	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	WTP	WTP
Provinsi Lampung	WTP	WTP
Nasional	WTP	WTP

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Lampung Timur telah mendapatkan 4 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Proses pemeriksaan BPK untuk penilaian tahun 2024 sampai saat ini masih berlangsung. Target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2023 adalah mempertahankan Opini WTP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di

- Kabupaten Lampung Timur dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
 3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
 4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan progam dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKA D Kabupaten Lampung Timur dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.
 5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2023, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
 6. Pengelolaan aset
Pengelolaan aset menggunakan instrumen aplikasi eBMD yang telah digunakan sejak tahun 2021.

7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lampung Timur, Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Analisis atas efisiensi pengangguran sumber daya

Tabel 3:63
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Opini BPK/WTP (opini)	WTP	94,42	105

Penyerapan anggaran 94,42 persen tingkat efisiensi 100 persen maka masih terdapat sisa anggaran 5,58 persen.

f. Anggaran yang di alokasikan Indikator Opini BPK/WTP

Tabel 3:64
Anggaran yang di alokasikan Indikator Opini BPK/WTP

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 447.586.507.756	Rp. 422.611.143.294



1. Indikator Nilai SAKIP

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Nilai SAKIP

Tabel 3:65
Indikator Nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Nilai SAKIP	B	B	B

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:66
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	CC	CC	B	CC	CC	B

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD.

Tabel 3:67
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Nilai SAKIP	B	B	B

- d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional.

Tabel 3:68
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Nilai SAKIP	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	57,80 (CC)	60,18 (B)
Provinsi Lampung	B	B
Sumatera Selatan	78,26 (A)	A

Indikator Nilai SAKIP tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang telah ditentukan, capaian kinerja Adapun data nilai dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3:69
Nilai SAKIP tahun 2020 s.d 2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
57,00 (CC)	58,02 (CC)	58,33 (CC)	57,80 (CC)	60,18 (B)

Tabel 3:70
Rincian penilaian perkomponen tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan kinerja	30	20,35	21,54
2	Pengukuran kinerja	30	15,96	16,20
3	Pelaporan kinerja	15	9,56	9,49
4	Evaluasi Internal	25	11,90	12,95
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,80	60,18
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja.		CC	B

- e. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - 1) Menyelaraskan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra dan Renja.
 - 2) Penegasan perangkat daerah untuk menyampaikan dokumen SAKIP.
 - 3) Pelaksanaan pendampingan dengan dengan Kementerian PAN &RB serta pejabat penyusun dokumen perencanaan pada perangkat daerah.
 - 4) Pengadaan e SAKIP.
 - 5) Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah
- f. Permasalahan Nilai SAKIP
 - 1) Beberapa SAKIP antara RPJMD, Renstra dan Renja kurang selaras.
 - 2) Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan dokumen SAKIP ke Esr.
 - 3) Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.
 - 4) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3:71
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Nilai SAKIP	B	91,41%	100

- h. Anggaran yang di alokasikan Indikator Nilai SAKIP

Tabel 3:72
Anggaran yang di alokasikan Indikator Nilai SAKIP.

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 80.350.344	Rp. 73.447.882

10. Sasaran Strategis
Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah
Indikator Pertumbuhan Investasi daerah

a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Investasi/BKPM sampai dengan bulan Desember tahun 2024, realisasi investasi di Kabupaten Lampung Timur mencapai **Rp 463.854.833.889,35** atau **205,2%** dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu Rp. 226.000.000.000.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PMDN **Rp. 340.437.368.280**
- 2) PMA **Rp. 123.417.465.609,35.**

Realisasi sebagaimana tersebut diatas, berasal dari 90 pelaku usaha yang berhasil mengimplementasikan rencana investasi di berbagai sektor.

Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan investasi yang signifikan di Kabupaten Lampung Timur, mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah ini. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan proses perizinan, insentif fiskal, dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi makro yang terjaga juga berperan penting dalam menarik minat investor, baik domestik maupun asing.

Peningkatan investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Lampung Timur. Masuknya modal baru ke berbagai sektor industri dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing Kabupaten Lampung Timur di pasar nasional dan global. Lebih lanjut, investasi yang meningkat juga berpotensi untuk mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3:73
Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Investasi Daerah	4	-16,27	-406

Investasi Tahun 2023 = Rp. 554.016.526.830

Investasi Tahun 2024 = 463.854.833.889,35

Hitung selisih antara investasi tahun 2024 dan 2023:

Rp. 463.854.833.889,35 – Rp. 554.016.526.830 = -90.161.692.940,65

Berdasarkan realisasi tahun 2024 investasi mengalami penurunan sebesar -16,27 persen dibanding tahun 2023.

Capaian pertumbuhan investasi daerah dengan target 20 persen, hanya terealisasi 16,27 persen dengan capaian -406 persen dari target yang berhasil dicapai dengan kata lain capaian **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2024

Tabel 3 :74
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2023 s.d 2024

Indikator	Realisasi Capaian			
	2023	2024	2023	2024
Pertumbuhan Investasi Daerah	3,51	-16,27	87,75	-406

c. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator tahun 2024 dengan RPJMD

Tabel 3 :75
Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2024 dengan RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Pertumbuhan Investasi Daerah	20	-16,27	-406

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3:76
Perbandingan Realisasi capaian Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Pertumbuhan Investasi Daerah	Realisasi Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	3,51	-16,27
Provinsi Lampung	4,55	4,57
Nasional	5,05	5,03

Tabel 3:77
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Pertumbuhan Investasi Daerah	-16,27	99,55	-406

e. Anggaran yang di alokasikan Indikator Pertumbuhan Investasi Daerah

Tabel 3:78
Anggaran yang di alokasikan Pertumbuhan Investasi Daerah

No	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realsisasi
1	Program Promosi Penanaman Modal	490.457.702	99,55

11. Sasaran Strategis

Meningkatnya Upaya Mitigasi bencana alam dan Kebakaran.

Indikator Ketahanan Daerah

a. Realisasi Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3:79
Indeks Ketahanan Daerah

Indikator	Target	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0.46	153

IKD adalah instrument untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Lampung Timur merupakan upaya untuk mengukur kapasitas

penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks resiko bencana 0,46 dari target 0,3 sehingga capaian kinerjanya sebesar 153 % dan masuk kategori **sangat baik**.

- b. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022 s.d 2024.

Tabel 3:80
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Daerah
tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,22	0,43	0,46	91	165	153

- c. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator tahun 2024 dengan IKU

Tabel 3 :81
Perbandingan Realisasi capaian Indikator tahun 2024 dengan IKU

Indikator	Target IKU	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,26	0,46	153

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Tabel 3:82
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Indeks Ketahanan Daerah	0,46	94,84 %	0,485 %

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indeks ketahanan daerah adalah 0,485 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 1 % penyerapan anggaran, capaian kinerja hanya 0,485 %. Dengan kata lain efisiensi penggunaan sumber daya

sangat rendah, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program untuk meningkatkan efisiensi tersebut.

g. Anggaran yang di alokasikan Indikator Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3:83
Anggaran yang di alokasikan Indikator Ketahanan Daerah

No	Nama Program	Jumlah Anggaran	Realsisasi
1	Penanggulangan Bencana	1.188.495.460	1.127.111.247

c. Nilai IKD tahun 2024 dan IRB tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tabel 3:84
Nilai IKD tahun 2024 dan IRB tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Lampung Barat	0.39	176.28
Tanggamus	0.71	120.21
Lampung Selatan	0.53	151.15
Lampung Timur	0.46	166.40
Lampung Tengah	0.47	106.14
Lampung Utara	0.29	131.20
Way Kanan	0.66	94.92
Tulang Bawang	0.49	114.44
Pesawaran	0.45	152.79
Pringsewu	0.42	88.82
Mesuji	0.37	113.03
Tulang Bawang Barat	0.41	112.66
Pesisir Barat	0.36	188.85
Kota Bandar Lampung	0.70	130.61
Kota Metro	0.52	104.07

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target IKU.

Tabel 3:85
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja tahun 2024 dengan target IKU

Indikator	Target	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Ketahanan Daerah	0,26	0.46	153

- e. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3:86
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Gunung Kidul dan Nasional

Indeks Ketahanan Daerah	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	0,26	0.46
Kabupaten Gunung Kidul	0,73	
Nasional	2,89	2,87

12.Sasaran strategis

Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal diperlukan sumber daya alam yang ada tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat tetap mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk keberlanjutan pembangunan dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya, diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya alam dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Nilai yang digunakan untuk menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah,

yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Keberhasilan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah juga bisa diukur dengan memanfaatkan indeks kualitas lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah 7,32 dengan klasifikasi cukup baik. Dengan target 66,00 maka kinerjanya mencapai 103,51 %. dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian IKLH dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3:

Capaian IKLH tahun 2024

No	Indeks	Targe t
1	IKLH	64,19
2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	82,46
3	IKA (Indeks Kualitas Air)	52,9
4	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	49,79

- a. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 3:87

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator	Target	Realisasi tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,19	71,47	111

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah 71,47 dengan capaian 111 klasifikasi cukup baik. Dengan target 64,19 dan masuk kategori sangat tinggi dengan capaian sangat baik.

- b. Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3:88
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	54,16	65,22	71,47	85	102	111

c. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Tabel 3:89
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2024 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	64,19	71,47	111

target RPJMD 64,19 realisasi 71,47 capaian 111 dari hasil ini menunjukkan kualitas lingkungan yang mencerminkan peningkatan pengelolaan lingkungan yang baik, pengurangan pencemaran, serta peran aktif masyarakat.

d. Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Tabel 3:90
Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	65,22	71,47
Provinsi Lampung	69,91	
Nasional	72,54	73,07

Untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), target 64,19 dan realisasi 71,47 capaian **sangat baik**, untuk mengetahui capaian masing-masing indeks sebagai berikut :

e. Tabel indicator indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tabel 3:91
Tabel indicator indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
1	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	50,54	95,71%
2	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU).	82,37	87,74	106,74%
3	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL).	48,29	48,80	101,05%
4	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	63,79	65,22	102,24%
5	Persentase penanganan Persampahan.	75	50	66,67%

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Tabel 3:92
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	111,34	97,77%	113,9%

Tingkat efisiensi adalah 113,9 %, dengan penyerapan anggaran sebesar 97,77 %, capaian kinerja yang diperoleh melebihi target, menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam penggunaan sumber daya.

g. Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator.

Tabel 3:93

Penjelasan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Nama Program	Jumlah Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Rp. 64.042.000	Rp. 62.614.722

g. Penyebab keberhasilan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 71,47 dari target 64,19, sehingga realiasi mencapai 111,34% (melebihi target). Adapun faktor yang mendukung Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehingga tercapainya realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya pemantauan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan jumlah 17 titik pantau (37 data) yang dilakukan oleh Kementerian, Provinsi dan Daerah;
- 2) Terlaksananya pemantauan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan jumlah 4 titik pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian;
- 3) Pemerintah Daerah sudah melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 4) Pengelolaan dan perhitungan nilai indeks sudah terintegrasi melalui Aplikasi IKLH dengan website <https://ppkl.menlhk.go.id> sehingga data hasil perhitungan terintegrasi antar Daerah dan Pusat;

Adapun permasalahan yang tampak pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat ringan dan 1 (satu) titik data pemantauan dikategorikan mengalami pencemaran tingkat sedang.
- 2) Sebanyak 4 titik lokasi pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lampung Timur tidak dapat Memenuhi kriteria data perhitungan sehingga data tidak dapat terverifikasi.
- 3) Belum dilakukannya inventarisasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemetaan RTH yang terkelola diluar Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan RTH.
- 2) Perlu melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH.
- 3) Perlu mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan inventarisasi kebijakan alih fungsi lahan.
- 4) Perlu pengayaan dan pemeliharaan pada tutupan hutan dan RTH (diluar pengelolaan RTH Dinas LHPKPP),
- 5) Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan menjaga tutupan hutan dan lahan
- 6) Perlu meningkatkan upaya penambagan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- 7) Melakukan pembinaan usaha/kegiatan yang izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan memfasilitasi pemenuhan ketentuan serta kewajiban perizinan tersebut.
- 8)

Penghargaan yang didapat baik tingkat Nasional maupun Provinsi di tahun 2024.

1. Piagam Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung atas Partisipasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik predikat Baik (2,78).
2. Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Timur memenuhi Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak dengan Kategori Madya.

BAB IV

PENUTUP

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyadari bahwa Laporan Kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya agar Laporan Kinerja tahun 2024 sedapat mungkin mendekati apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun RPJMD periode 2021–2026 yang berarti, pada tahun 2024 ini akan mulai memasuki tahap pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah 2021–2026 Kabupaten Lampung Timur, RPJMD 2021-2026 disusun mengacu pada rencana jangka panjang, terutama dalam menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan guna mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.
3. Laporan Kinerja tahun 2024 difokuskan pada penilaian keberhasilan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang dikaitkan dengan indikator kinerja utama daerah.
4. Secara umum, seluruh sasaran strategis yang direncanakan pada tahun 2024 telah berhasil dan telah diterima sebagai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian, dokumentasi atas pencapaian keberhasilan terkendala oleh mekanisme pendataan yang belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja :

- a. Menyelaraskan dokumen Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, karena keselarasan merupakan syarat utama dari kualitas perencanaan kinerja yang baik, sehingga diharapkan sasaran kinerja perangkat daerah akan memiliki korelasi terhadap sasaran kinerja tingkat kabupaten yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.
- b. Melaksanakan program/kegiatan yang selaras dengan Renstra dan berorientasi pada hasil.
- c. Perjanjian kinerja telah disusun sampai level individu.
- d. *Cascading* telah disusun.
- e. Pohon kinerja telah disusun

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	94,46	2.131.663.102.999,38
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.056.655.257,00	207.567.574.087,17	91,02	196.136.238.928,38
4.1.01	Pajak Daerah	87.870.000.000,00	83.550.226.924,00	95,08	83.816.436.780,30
4.1.02	Retribusi Daerah	5.626.300.000,00	3.749.508.473,00	66,64	4.704.579.364,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,63	3.020.927.854,18
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.960.355.257,00	117.062.925.324,58	95,20	104.594.294.929,90
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	228.056.655.257,00	207.567.574.087,17	91,02	196.136.238.928,38
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,00	94,83	1.935.526.864.071,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.756.006.000,00	88.946.258.000,00	65,04	75.432.109.191,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.183.258.184.000,00	1.193.360.241.000,00	100,85	1.077.274.703.452,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.686.990.000,00	112.366.030.326,00	97,13	61.763.625.193,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	352.896.476.000,00	333.646.319.051,00	94,55	343.089.811.030,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00
4.2.01.05	Dana Desa	272.698.701.000,00	271.562.076.800,00	99,58	269.334.514.100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	287.698.701.000,00	271.562.076.800,00	94,39	269.334.514.100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.200.318.144,00	129.591.067.479,00	76,59	108.632.101.105,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	169.200.318.144,00	129.591.067.479,00	76,59	108.632.101.105,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	169.200.318.144,00	129.591.067.479,00	76,59	108.632.101.105,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,00	94,83	1.935.526.864.071,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	94,46	2.131.663.102.999,38
5	BELANJA DAERAH	2.559.987.749.455,00	2.309.190.574.317,60	90,20	2.096.191.300.837,69
5.1	BELANJA OPERASI	1.746.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.655,97
5.1.01	Belanja Pegawai	931.016.278.263,00	877.743.801.240,51	94,28	819.352.172.551,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.144.388.263,00	461.577.506.441,49	87,23	445.590.387.092,82
5.1.05	Belanja Hibah	283.526.070.668,00	241.174.866.230,90	85,06	234.335.347.242,48
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.156.775.675,00	2.442.292.220,00	77,37	3.354.771.769,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.746.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.655,97
5.2	BELANJA MODAL	383.985.335.511,00	320.800.571.557,70	83,55	188.842.370.386,72
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.202.728.382,00	34.779.530.896,00	84,41	21.093.974.539,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.368.382.266,00	90.778.537.780,46	92,28	67.753.207.114,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	228.771.494.743,00	182.535.782.693,24	79,79	87.181.542.397,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.392.730.120,00	12.706.720.188,00	82,55	12.813.646.335,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	383.985.335.511,00	320.800.571.557,70	83,55	188.842.370.386,72
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	420.608.901.075,00	400.538.478.705,00	95,23	404.681.881.795,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.026.308.089,00	6.849.470.000,00	36,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.261.118.586,00	562.630.000,00	44,61	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	420.608.901.075,00	400.538.478.705,00	95,23	404.681.881.795,00

	JUMLAH BELANJA	2.559.987.749.455,00	2.309.190.574.317,60	90,20	2.096.191.300.837,69
	SURPLUS/DEFISIT	(85.684.419.054,00)	27.921.426.100,33	(32,59)	35.471.802.161,69
6	PEMBIAYAAN DAERAH	85.684.419.054,00	85.684.419.054,05	100,00	52.212.616.892,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.684.419.054,00	87.684.419.054,05	100,00	54.212.616.892,36

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.684.419.054,00	87.684.419.054,05	100,00	54.212.616.892,36
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.684.419.054,00	87.684.419.054,05	100,00	54.212.616.892,36
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.684.419.054,00	85.684.419.054,05	100,00	52.212.616.892,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	113.605.845.154,38	0,00	87.684.419.054,05

Kab. Lampung Timur, 05 Maret 2025
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si
 NIP. 197203051993031002



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 01.a /08-UK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR
B.306/08-UK/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021–2026**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor B.306/08-UK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
b. bahwa Lampiran Keputusan Bupati dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan pada sasaran maupun indikator karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-UK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 2017terakhir tentang Undang-Undang Nomor 06 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-UK/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sukadana
03 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B.01.a TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR B.306/08-UK/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2021-2026

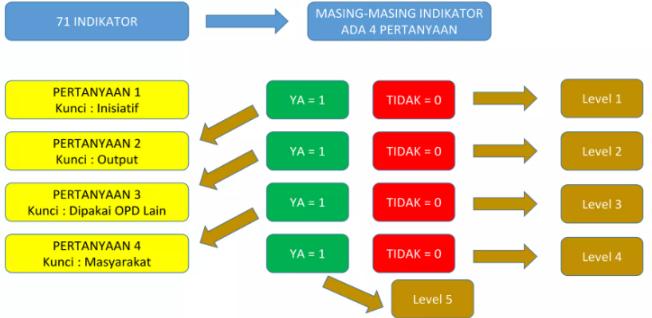
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	Persentase	$= \frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ n - PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ (n-1)}{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Thn\ (n-1)} \times 100\%$	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan. 3. BPS Kabupaten Lampung Timur	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Perikanan dan Peternakan. 2. Dinas Perikanan dan Peternakan.
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton)	Skor	Skor PPH=% kontribusi energi AKG X bobot	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
3	Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	Indeks Infrastruktur Daerah = [30%(I_U) + 25% (I_I) + 20% (I_{PR}) + 25 % (I_{Pm}) $I_{Pm} = (50\% (I_{Air}) + 50\% (I_{BAB})$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

				<p>Perhitungan :</p> $I_J = \frac{\text{Panjang Jalan kondisi mantap} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}{\text{Panjang Jalan mantap maksimum} - \text{panjang jalan kondisi mantap minimum}}$ $I_I = \frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik} - \text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik maksimum} - \text{panjang jaringan irigasi kondisi baik minimum}}$ $I_{PR} = \frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW maksimum} - \text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW minimum}}$ $I_{AIR} = \frac{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}{\text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani maksimum} - \text{Jumlah RT pengguna SPAM terlayani minimum}}$ $I_{BAB} = \frac{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}{\text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB maksimum} - \text{Jumlah RT berfasilitas tempat BAB minimum}}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> I_J : Indeks Kemantapan Jalan I_I : Indeks Kemantapan Jaringan Irigasi I_{PR} : Indeks Penataan Ruang I_{AIR} : Indeks RT berfasilitas air minum bersih I_{BAB} : Indeks RT berfasilitas tempat BAB <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> Range Kemantapan : 0,67 – 1,00 : MANTAP 0,34 – 0,66 : SEDANG 0,00 – 0,33 : TIDAK MANTAP </div>		
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	$IMP = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 \times X_3)$ <p>Keterangan :</p> <p>X₁ = Indeks Harapan Hidup</p> <p>X₂ = Indeks Pendidikan</p> <p>X₃ = Indeks Standar Hidup Layak</p>	BPS Kabupaten Lampung Timur	3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Keterangan: $\alpha = 0$. z = garis kemiskinan. y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < 1$. Q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk </p>	BPS Kabupaten Lampung Timur	4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	Persentase	$R(t-1, t) = \frac{[PDB_t - PDB_{t-1}]}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan : R = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDB_t = pendapatan nasional pada tahun t. PDB_{t-1} = pendapatan nasional pada tahun $t-1$ (tahun sebelumnya) </p>	BPS Kabupaten Lampung Timur	4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persentase	$\frac{kejadian_{(n)} - kejadian_{(n-1)}}{jumlah\ kejadian_{(n-1)}} \times 100$ <p>Keterangan : $jumlah\ kejadian_{(n-1)}$ = jumlah kejadian satu tahun sebelumnya. $jumlah\ kejadian_{(n)}$ = jumlah kejadian tahun yang sedang berjalan. </p>	BPS Kabupaten Lampung Timur	3. Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Sekretariat Daerah

8	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	IPP = Nilai Aspek Pelayanan Publik X bobot	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah																																										
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah																																										
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																																										
		Nilai SAKIP	Nilai	<p>Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Komponen yang dinilai :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen 1 Keberadaan</th> <th>Sub Komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub Komponen 13 Pemanfaatan</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nilai hasil Tingkat Akutabilitas</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 13 Pemanfaatan	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%		2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3	Pelaporan Kinerja	6	9	15	30	4	Evaluasi Internal	3	4,5	7,5	15	5	Capaian Kinerja	5	7,5	12,5	25	6	Nilai hasil Tingkat Akutabilitas	20	30	50	100	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
No	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 13 Pemanfaatan	Bobot																																											
1	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%																																												
2	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																											
3	Pelaporan Kinerja	6	9	15	30																																											
4	Evaluasi Internal	3	4,5	7,5	15																																											
5	Capaian Kinerja	5	7,5	12,5	25																																											
6	Nilai hasil Tingkat Akutabilitas	20	30	50	100																																											
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi insvestasi daerah (%).	Pertumbuhan investasi daerah (%).	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun n} - \text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun n-1}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Daerah (Rp.miliar) tahun n}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu																																										

						Pintu
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1. Dinas Sosial 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	<p>IKA Indeks Kualitas Air Adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu</p> <p>IKU Indeks Kualitas Udara Adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (leu - 0,1) \right)$	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

		<p>IKL Indeks Kualitas Lahan</p> <p>Adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>IKLH Kabupaten</p> $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
--	--	--	--	--

Ditetapkan di
pada tanggal

Sukadana
03 Januari 2024



LAMPIRAN II
KEPUTUAB BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B.01a TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 306 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026

No.	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
			1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%).	0,32	1	2	3	4	4
2	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor PPH (ton).	84,70	84,71	84,72	84,73	84,74	84,75
3	Meningkatnya kemampuan infrastruktur daerah.	Indeks Infrastruktur Daerah.	0,5	0,52	0,56	0,60	0,68	0,68
4	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia.	69,39	69,4	69,5	69,6	69,8	69,9
5	Menurunnya persentase penduduk miskin.	Persentase Penduduk Miskin.	14,62	14,62	14,55	14,4	14,2	14
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah .	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).	1,0	3,5	3,5	3,6	3,8	4
7	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban Masyarakat.	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas.	1	1	2	2	2	4

8	Meningkatnya kualitas layanan publik .	Indeks Pelayanan Publik.	2,00	2,05	2,10	3,50	3,80	4,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	81	82	83	84	85	86
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B	B
10	Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah.	Pertumbuhan investasi daerah.	0,1	4	4	20	20	25
11	Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam dan kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah	0,24	0,24	0,26	0,3	0,41	0,44
12	Meningkatnya tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	62,97	63,38	63,79	64,19	64,59	64,99

Ditetapkan di
pada tanggal

Sukadana
03 Januari 2024



